



FRAME WORK MENUJU INDONESIA RAHMATAN LIL 'ALAMIN
(*Framework Towards Indonesia Rahmatan lil 'Alamin*)

Syahrul Efendi Dasopang

Ikatan Sarjana Al-Qur'an Indonesia
email: syahruldasopang@gmail.com

Fina Rahmania

Universitas PTIQ Jakarta
email: finarahmania16@gmail.com

Abstract

Islam is a religion that is a blessing for all nature. This is in accordance with the mission of Islamic teachings, namely to free humans from various forms of anarchy and injustice. At the value level, Islam from the beginning teaches goodness and noble morality, and at the same time prohibits all evil behavior. The ideal moral ideal of Islam is to build a world in which Muslims and non-Muslims live together enjoying justice, peace, compassion and harmony. Moral ideals are the duty of all elements of society, especially religious leaders and intellectuals, to grasp religious moral messages that can lead to a harmonious life amidst plurality. This research aims to formulate a framework to realize Indonesia rahmatan lil 'alamin. At this level too, character education has a strategic role in achieving Islamic ideals so that its adherents have a pluralistic mindset, not sectarian, let alone discrediting other groups. In this way, Muslims understand the meaning, characteristics and mission of Islam so that people no longer use Islam for personal, group and party interests. In fact, there are no longer any extreme beliefs that use the name of Islam as a cover for the purpose of carrying out acts of terrorism.

Keywords: Islam, Rahmat, Religion, Indonesia, Framework.

Abstrak

Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini sesuai dengan misi ajaran Islam, yakni membebaskan manusia dari berbagai bentuk anarki dan ketidakadilan. Pada tataran nilai, Islam sejak awal mengajarkan kebaikan dan moralitas luhur, dan pada saat yang sama melarang segala perilaku jahat. Cita-cita moral ideal Islam adalah membangun dunia yang didalamnya orang Islam maupun non-Islam hidup bersama menikmati keadilan, kedamaian, kasih sayang, dan keharmonisan. Cita - cita moral merupakan tugas semua elemen masyarakat, terutama para pemimpin agama dan para intelektual untuk menangkap pesan-pesan moral agama yang dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis di tengah pluralitas. Penelitian ini bertujuan memformulasikan kerangka kerja untuk mewujudkan Indonesia rahmatan lil 'alamin. Pada tataran ini pula, pendidikan karakter memiliki peran strategis dalam menggapai cita-cita Islam agar para penganutnya memiliki mindset yang pluralistik, tidak sektarian apalagi mendiskreditkan golongan lain. Dengan demikian, umat Islam mengerti akan pengertian, karakteristik, dan misi Islam sehingga orang tidak lagi mengatasnamakan Islam untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan partai. Bahkan, tidak ada lagi paham ekstrem yang mengatasnamakan Islam sebagai kedok dengan tujuan untuk melakukan aksi terorisme.

Kata kunci: Islam, Rahmat, Agama, Indonesia, Kerangka Kerja.

PENDAHULUAN

Tulisan ini dibuat untuk mengejawantahkan secara konseptual tentang perintah Allah untuk mengejawantahkan rahmat-Nya pada lingkungan kemanusiaan dan secara khusus untuk menegakkan keadilan dan memperhatikan nasib lapisan masyarakat yang miskin dan tak berdaya oleh sebab-sebab struktural. Menolong lapisan masyarakat ini

haruslah benar-benar terencana, terstruktur dan terlaksanakan dengan terpandu dan terukur, Boleh dikatakan, tulisan ini merupakan penjelmaan dari pesan dari Al-Quran surat Al-Ma'un dalam konteks dan situasi zaman sekarang yang kompleks dan rumit, Oleh karena itu, tulisan ini tidak akan lagi dihiasi dengan ayat-ayat Alquran, karena sudah diturunkan menjadi konsep praktis.

Tiada maksud tulisan ini selain untuk penyebaran ide pentingnya menuju transformasi Indonesia sebagai negara rahmat bagi semesta. Sebagai negara Muslim, adalah memprihatinkan jika kemiskinan yang umumnya melanda umat Islam, masih menjadi masalah kronis yang tiada kunjung terkikis dalam perjalanan nebara ini.

Bagaimana mungkin Indonesia menjadi rahmatan lil 'alamin, jika problem kemiskinan masih membelenggu dirinya, Hanya negara yang makmur, bebas dan kuat yang bisa mencapai kedudukannya sebagai rahmat bagi semesta. Pemikiran ke arah Indonesia rahmatan lil 'alamin diperlukan dewasa ini untuk melepaskan belenggu mental sekaligus sebagai cakrawala baru bagi orang Indonesia untuk memberi andil bagi tatanan kemanusiaan. Semoga tulisan ini menjadi pegangan berarti bagi setiap insan yang cinta kedamaian dan keadilan yang jujur.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, analisis data bersifat induktif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Jenis penelitian termasuk dalam penelitian eksploratif yaitu dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan permasalahan yang awal-nya peneliti hanya memahami permasalahan yang ada secara umum, kemudian peneliti melakukan penelitian. Penelitian eksploratif memiliki masalah yang belum pernah dijejaki, dan berusaha menemukan atau mengungkap permasalahan yang sedang dibutuhkan atau akan diteliti tersebut. Metode penelitian menggunakan studi literatur yaitu peneliti menelaah secara teliti bahan kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian dan juga mengkombinasikan dengan menggunakan wawancara pada informan yang diperlukan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. INDONESIA RAHMAT UNTUK SEMESTA

Banyak negara bertransformasi menjadi negara raksasa, akan tetapi wajah yang muncul dari negara tersebut ialah negara yang mengancam dan menghembuskan dominasi dan permusuhan. Indonesia mempunyai kesempatan yang luas untuk berubah menjadi negara determinan dalam kancah internasional, namun hendaknya dihindari citra sebagai negara yang mengancam kedamaian dan menebar permusuhan dan dominasi yang negatif. Untuk itulah transformasi Indonesia sebagai negara raksasa dan determinan di kemudian hari harus menjadi rahmat bagi semesta. Rahmat yang dimaksud ialah membawa kedamaian, keadilan, keamanan, dan kemakmuran bagi seluruh negara-negara di dunia. Itulah visi yang disebut Indonesia Rahmat Bagi Semesta. Adakah prospek transformasi semacam itu bagi Indonesia, akan diuraikan lebih lanjut.¹

Refleksi Historis

Indonesia sebagai bangsa dan negara mewujudkan oleh dorongan kesatuan cita-cita masa depan, pengalaman bersama sebagai objek jajahan Belanda di masa lalu, dan ikatan agama dan budaya yang membina kehidupan batin seluruh penduduk yang

¹ Harjani Hefni, "Makna Dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan Lil'Alamin Di Indonesia." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 1 (Juni 2017): 1–20.

berdiam di berbagai pulau dalam kesatuan teritorial yang berlangsung sejak lama, yaitu kepulauan Nusantara.

Sejak Indonesia merdeka pada 1945, telah berlangsung berbagai peristiwa historis yang begitu mendalam dan luas pengaruhnya bagi kehidupan politik, ekonomi, dan budaya bagi penduduk Indonesia. Tiga peristiwa paling historis yang memiliki andil yang besar terhadap proses pertumbuhan dan pendewasaan Indonesia, yaitu revolusi kemerdekaan (1945-1949) yang melahirkan berdirinya Republik Indonesia, kemudian pergolakan yang diawali pembunuhan jenderal-jenderal terkemuka AD yang mengakibatkan turunnya Presiden Soekarno (1965-1966)), dan gerakan reformasi yang memaksa berhentinya Presiden Soeharto (1998). Masing-masing dari ketiga peristiwa tersebut berdampak bagi perubahan orientasi dan mentalitas kebangsaan yang signifikan.²

Peristiwa revolusi kemerdekaan 1945-1949 membuat pendulum sejarah Indonesia bergerak ke “kiri”, sedangkan peristiwa besar 1965-1966 mengakibatkan pendulum sejarah bergeser ke “kanan”. Adapun peristiwa reformasi 1998 mencoba membuat keseimbangan “kiri” dan “kanan”, meskipun kenyataannya tidak bisa berlangsung statis. Terbukti, rezim kiri dan kanan silih berganti berkuasa.

Melihat dinamika sejarah Indonesia tersebut, sudah sepatutnya Indonesia tidak lagi terpasung oleh gerak sejarah pertarungan antara “kiri” dan “kanan”, sekalipun hal ini tidak mudah dihapuskan. Indonesia ke depan, harus menghadapkan orientasinya lebih banyak ke luar, ketimbang ke dalam, kendatipun persoalan internal harus diatasi dan dipecahkan juga. Dengan cara pandang ke luar (*outward looking*) itu, Indonesia akan lebih dinamis dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memberi pengaruh dan andil dalam menata kehidupan umat manusia di planet yang istimewa ini. Saat ini, Indonesia hanya puas dengan pengaruhnya yang lunak terbatas di kawasan Asia Tenggara. Padahal di masa Presiden Soekarno, sekalipun negara ini dalam usia yang sangat muda, sudah sanggup menyebarkan pengaruh ideologinya hingga meliputi Asia dan Afrika. Lantas, proyeksi Indonesia macam apakah yang diperlukan untuk postur Indonesia masa depan?³

Proyeksi Masa Depan

Di masa mendatang, sudah barang tentu dengan seiring waktu, jumlah populasi penduduk Indonesia semakin meningkat. Pada saat yang sama, pengalaman Indonesia dalam bernegara semakin panjang. Sementara, luas teritorial Indonesia akan tetap stagnan, kalau bukan menyusut. Beberapa pulau kecil telah lenyap ditelan laut, sebagian lagi hilang diambil negara lain lewat mekanisme hukum internasional, dan seperti halnya Timor Timur yang terampas dari tangan Indonesia, bukan tidak mungkin daerah seperti Papua di kemudian hari juga akan terampas dari rangkaian kepulauan Indonesia. Akankah wilayah Indonesia semakin menyusut? Hal itu tergantung pada kemampuan Indonesia sendiri dalam mengelola wilayahnya. Jika Indonesia sanggup dan kuat, bahkan luas wilayahnya dapat saja bertambah, seperti halnya yang dinikmati oleh negara Israel. Namun harus direnungkan secara jernih, untuk apa sebetulnya suatu negara menambah luas teritorialnya? Perluasan teritorial seperti apakah yang diperlukan oleh suatu negara, seumpama Indonesia?

Pada dasarnya, perluasan cakupan suatu negara seiring dengan kapasitasnya yang meningkat adalah hal yang alamiah. Cakupan yang dimaksud di sini bisa berarti jangkaun kekuasaan teritorial atau jangkauan pengaruh politik. Pada saat yang sama, penyusutan cakupan suatu negara bisa menyusut seiring menyusutnya kapasitas

² Muhammad Nur Jamaluddin, “Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (Desember 2021): 271–394.

³ Ibid.

negara tersebut. Lihatlah bagaimana hari ini RRC mulai mempermasalahkan klaim teritorial beberapa negara di wilayah Laut Cina Selatan. Hal itu terjadi karena kapasitas negara RRC semakin meningkat. Dahulu pun Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, dan lain-lain memiliki teritorial yang meluas melewati batas benua Eropa tempat negara itu berasal. Setelah itu, Jerman, Uni Soviet, Italia, dan Jepang juga memperluas wilayahnya masing-masing pada pertengahan abad 20, sekalipun hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Hanya Uni Soviet yang kini jadi Rusia yang sempat bertahan lama menikmati perluasan wilayahnya. Jauh sebelum itu, kekaisaran Romawi, Persia, Cina, India, dan Kekhalifahan Islam juga memiliki perluasan wilayah yang sangat signifikan pada masanya.⁴

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tidak boleh lagi terpaku pada prinsip defensif dalam mengelola eksistensinya. Indonesia harus menanggalkan mentalitas pengekor dan perasaan cukup dengan capaian wilayah dan pengaruh sebatas Asia Tenggara seperti yang ia nikmati selama ini. Ia harus dengan gesit memperluas cakupan pengaruhnya. Pengalaman dan capaiannya yang mengesankan saat bertransformasi menjadi negara modern yang demokratis dewasa ini, dapat dijadikan modal yang berharga dalam langkah selanjutnya menjadi negara yang berpengaruh luas di dunia.

Beberapa Modal Indonesia Menjadi Negara Determinan

Indonesia memiliki modal yang lebih dari cukup untuk mengubah postur dirinya dari negara lunak menjadi negara determinan. Sejumlah modal tersebut antara lain:

1. Teritorial Yang Luas

Indonesia memiliki teritorial yang sangat luas. Lebih dari cukup untuk dimaknai sebagai basis dan modal awal untuk memperluas pengaruh dan teritorialnya.

2. Sumber daya Alam dan Lingkungan

Tidak banyak negara yang menikmati karunia Tuhan seperti Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk dijadikan bahan baku industri, baik untuk kebutuhan sipil maupun militer. Di samping itu, letaknya yang menguntungkan dalam jalur perdagangan dunia maupun posisi geografisnya yang strategis dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kedudukan dan pengaruh Indonesia.

3. Populasi Penduduk

Populasi penduduk Indonesia termasuk lima besar negara-negara dunia. Modal populasi yang besar ini lebih dari cukup untuk menggerakkan roda industri secara mandiri maupun untuk keperluan angkatan perang.

4. Organisasi Pemerintahan

Selama apapun organisasi pemerintahan yang dimiliki Indonesia, eksistensi dan pengalamannya dalam menjalankan roda negara, merupakan modal yang sangat berharga dalam upaya mengubah Indonesia menjadi negara determinan.

5. Angkatan Perang

Angkatan perang Indonesia relatif kecil dibanding dengan angkatan perang negara-negara dengan populasi besar. Tapi bagaimana pun, angkatan perang yang dimiliki Indonesia dapat menjadi modal yang menentukan dalam upaya mengubah postur Indonesia di masa depan. Selain itu, persenjataan yang dimiliki oleh angkatan perang Indonesia masih belum seimbang dengan kebutuhan dan tanggung jawab militer Indonesia dalam mengawal dan mengamankan eksistensi Indonesia. Apalagi jika

⁴ Hefni, "Makna Dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan Lil'Alamin Di Indonesia."

Indonesia melangkah maju menjadi negara yang berpengaruh luas dan determinan di antara negara-negara dunia, maka kapasitas angkatan perang beserta persenjataannya memerlukan peningkatan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.

6. Capaian Teknologi

Capaian Indonesia dalam teknologi sebenarnya sangat menggembirakan. Teknologi kedirgantaraan, kelautan, pangan, dan perkeretaapian sebagai sekelumit contoh, dapat diakselerasikan menjadi lebih besar dan mandiri. Capaian teknologi Indonesia tersendat akibat rendahnya komitmen politik kemandirian pemerintah. Bila saja Indonesia dengan konsisten menerapkan politik berdikari yang tanpa harus jatuh menjadi xenophobia atau isolasi diri, dapat dipastikan perkembangan teknologi Indonesia akan jauh lebih pesat dari pada yang dicapai dewasa ini.⁵

Melangkah Menjadi Indonesia Rahmat Untuk Semesta

Adalah saatnya Indonesia melangkah maju menjadi negara yang menentukan percaturan internasional. Andil dan keterlibatannya dalam percaturan internasional dalam rangka mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di planet ini sangat diperlukan. Gagasan tentang planet bumi yang akan hancur akibat peperangan nuklir dan biologi dan alternatif planet lain sebagai habitat umat manusia di masa depan, merupakan kekurangan dari sebagian elit manusia di planet ini yang tidak termaafkan. Alih-alih memelihara bumi sebagai karunia Tuhan, sebagian manusia malah berpikir mencari planet lain sebagai alternatif habitat umat manusia di masa depan. Untuk hal itu, Indonesia dituntut mentransformasikan diri menjadi negara yang siap memikul tanggung jawab besar agar bumi dan isinya tetap lestari sebagai surganya umat manusia. Ditambah lagi, Indonesia dikarunia iklim tropis dengan panorama alam laksana surga. Tentulah penduduk di kepulauan Indonesia tidak mungkin berpikir untuk merelakan habitatnya lenyap dan mencoba mencari planet pengganti. Seimbang dengan tanggung jawab besar seperti itu menuntut postur, kapasitas dan kompetensi negara Indonesia yang besar pula.⁶

Prasyarat menjadi Indonesia rahmat untuk semesta, pertama-tama yang harus diselesaikan oleh Indonesia dalam internalnya ialah:

1. Akhiri segera ketimpangan ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia, sehingga kemakmuran dan keadilan merata ke segenap penduduk. Tidak ada lagi di masa depan segelintir kecil orang/kelompok memiliki konsentrasi kekuasaan ekonomi atau pun konsentrasi kekuasaan politik.
2. Perkokoh persatuan antar segenap penduduk. Salah satu cara untuk memperkuat persatuan nasional, yaitu dengan menarik setiap pemuda Indonesia wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan militer. Dalam masa pendidikan militer tersebut, indoktrinasi visi Indonesia Rahmat untuk Semesta harus ditanamkan dengan baik. Apabila pemuda-pemudi tersebut berhasrat meneruskan karirnya di dunia militer, negara dapat menyalurkan dan menyeleksinya dengan ketat sehingga diperoleh personel-personel militer yang tangguh dan bermutu tinggi. Sebaliknya yang tidak meneruskan karir di dunia militer setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan militer, dapat ditempatkan sebagai tentara cadangan. Kualifikasi pendidikan dan pelatihan militer yang diberikan kepada segenap pemuda Indonesia tersebut setingkat pendidikan dan pelatihan dasar militer.

⁵ Dwi Kartikasari and Rifki Khoirudin, "Analisis Determinan Impor Di Indonesia Periode 2011 - 2020." *Ecoplan* 5, no. 1 (April 2022): 72–86.

⁶ Jamal Mamur Asmani, "Rekonstruksi Teologi Radikalisme Di Indonesia, Menuju Islam Rahmatan Lil Alamin." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, no. 1 (Juli 2017): 3.

3. Majukan agama-agama yang ada di Indonesia, terutama agama terbesar, mengingat agama merupakan sumber daya spritual dan moral bagi rakyat dan negara.
4. Perkuat angkatan perang Indonesia, yaitu TNI.
5. Penuhi kebutuhan rasa bangga rakyat sebagai bagian dari penduduk Indonesia. Prestasi teknologi dan kebudayaan serta kepemimpinan yang visioner dan adil adalah sekian alat untuk memuaskan rasa bangga rakyat Indonesia pada bangsa dan negaranya.
6. Perkuat ikatan batin dan ketaatan antara pemerintah dan rakyat. Pada hal ini, dituntut sifat pemerintah yang bisa dipercaya, mengayomi dan membimbing.
7. Ubah pemerintah dari objek cibiran dan ketidakpercayaan menjadi subjek teladan dalam keadilan, kesederhanaan hidup, dan kegairahan dalam semangat membawa Indonesia menjadi negara rahmat untuk semesta.

Itulah visi yang relevan untuk diwujudkan terhadap Indonesia, khususnya oleh para patriot Indonesia. Visi semacam itu dapat mengatasi belenggu mental *defensif* dan orientasi *inward looking* yang menghinggapi mayoritas anak bangsa Indonesia, sehingga diharapkan langkah maju menjadi ringan dan penuh gairah.⁷

B. MENGURAI DAN MEMECAHKAN AKAR MASALAH DI INDONESIA

Sudah menjadi lumrah, suatu negara akan tumbuh pesat kemajuannya, ketika masalah internalnya dapat terselesaikan terlebih dahulu. Indonesia, jika hendak melangkah maju menjadi negara yang berpengaruh dengan visi yang segar, terlebih dahulu ia harus membereskan masalah-masalah utama internalnya. Masalah utama internal Indonesia tersebut ialah ketimpangan dan kemiskinan. Inilah yang membebani dan membelit Indonesia sejak lama sehingga lamban untuk melangkah maju. Dapat dipastikan, seluruh akar konflik yang laten meledak di Indonesia berasal dari masalah ini.⁸

KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN RAKYAT

Tidak ada yang perlu diragukan lagi, terutama untuk kasus masyarakat Indonesia dimana kita hidup dan menyelenggarakan hidup di dalamnya, bahwa sebab-sebab kemiskinan secara massal dari kota-kota hingga desa-desa di Indonesia ialah susunan ekonomi yang dirancang sedemikian rupa bersifat hirarkis-sistematis-eksploitatif dan melembaga akibat tidak pernah terjadinya koreksi yang mendasar. Susunan ekonomi yang eksploitatif itu sudah berjalan ratusan tahun, dimulai sebelum era penjajahan, kemudian dilembagakan lebih sistematis pada era penjajahan, dan ketika Indonesia berdiri serentak dengan hengkangnya penjajah, pemainnya saja yang berganti, susunan dan praktiknya tidak berubah sama sekali.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sritua Arief, “Sejak lama sampai sekarang saya berpandangan bahwa proses ekonomi nasional kita mengandung ciri proses yang eksploitatif. Proses eksploitatif ini dimulai secara sistematis pada zaman kolonial Belanda.” (Sritua Arief; 1990). Susunan ekonomi model lama yang cenderung zalim, jika tidak ada perombakan besar-besaran hanya akan melembagakan eksploitasi ekonomi yang permanen dan kekal. Penduduk yang lahir setiap menit, masing-masing akan antri mengisi susunan ekonomi tersebut dan hanya tersedia perbedaan mengenai peran dan posisi, siapa yang bertindak dan berkedudukan sebagai pemeran dan siapa pula yang diperas. Pastinya, yang diperas adalah golongan terbesar dari masyarakat. Lebih jauh

⁷ Ibid.

⁸ A. Tenrinippi, “Kewirausahaan Sosial Di Indonesia (Apa , Mengapa , Kapan , Siapa Dan Bagaimana).” *Meraja Journal* 2, no. 3 (2019): 25–40.

bagaimana proses pemerasan dan pemiskinan itu berlangsung dalam masyarakat, kita ikuti penjelasan Sritua Arief berikut.

“Kemiskinan rakyat di Indonesia bukan disebabkan mereka sejak semula tidak mempunyai faktor-faktor kultural yang dinamis. Mereka terbelakang dan miskin karena kesempatan tidak diberikan kepada mereka. Atau mereka miskin karena berbagai kesempatan sudah dihancurkan dan hilang dari jangkauan mereka. Dan proses penghancuran ini telah berlangsung sejak lama, mulai dari zaman feodalisme kerajaan (baik kerajaan Hindu maupun Islam), zaman kolonial Belanda, dan akhirnya zaman pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini.

Secara lebih spesifik, keterbelakangan dan kemiskinan rakyat Indonesia disebabkan oleh proses penghancuran kesempatan yang terjadi sebagai akibat proses eksploitasi. Proses eksploitasi ini mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut: (1) Pertukaran yang tidak adil dalam proses tukar-menukar komoditi; (2) Pembayaran yang tidak adil atas jasa-jasa pekerja; dan (3) Pengenaan pungutan yang relatif memberatkan dari penguasa terhadap rakyat kecil, misalnya pajak tanah pada zaman feodal.

Proses penyingkiran massa pekerja dari sistem produksi sebagai akibat intensifikasi modal dalam produksi di berbagai bidang merupakan proses tambahan yang mempersempit kemungkinan naiknya taraf hidup massa miskin. Proses eksploitasi mengakibatkan terjadinya pengalihan surplus nilai dari pihak pekerja atau massa rakyat kepada yang lebih di atas dalam proses produksi, yaitu pemilik modal dan tanah. Proses eksploitasi yang sudah berlangsung ratusan tahun di Indonesia akhirnya menimbulkan massa miskin yang praktis tidak mempunyai harta produktif (*productive asset*) atau harta yang dapat menimbulkan pendapatan (*earning asset*). Akibatnya massa miskin akhirnya berada dalam lingkaran kemiskinan yang tidak berujung (*vicious circle of poverty*).

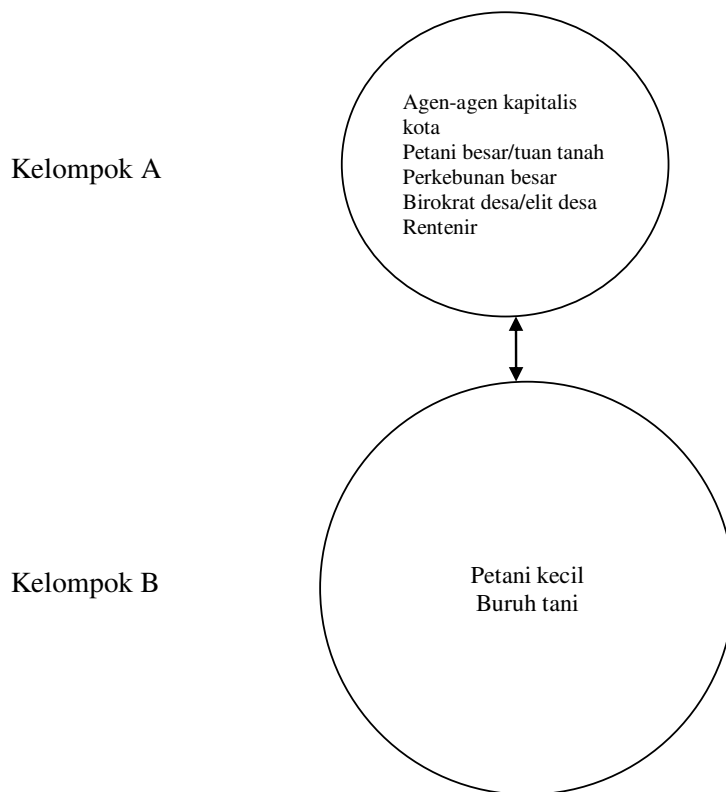
Sebagai ilustrasi mengenai proses terjadinya kemiskinan di masyarakat pedesaan kita di sektor pertanian, baiklah saya tunjukkan dalam bentuk skema-skema. Skema 23.1 menunjukkan pelapisan sosial atau aktor-aktor ekonomi yang bermain dalam ekonomi petani. Hubungan ekonomi yang terjadi antara kelompok atas (kelompok A) dengan kelompok bawah (kelompok B) yang sifatnya eksploitatif sepanjang masa telah mengakibatkan berakumulasinya surplus ekonomi yang makin membesar untuk kelompok kuat, dan makin mengecil untuk kelompok lemah seperti yang ditunjukkan dalam Skema 23.2. Proses penciptaan surplus ekonomi yang menjurus kepada posisi sirnanya harta-harta produktif dalam penguasaan kelompok lemah akhirnya menimbulkan lingkaran kemiskinan yang tidak berujung yang diderita oleh kelompok lemah. (Lihat Skema 23.3).⁹

Lingkaran kemiskinan dapat diuraikan sebagai berikut: “Karena miskin maka penguasaan sumber ekonomi menjadi rendah, sehingga membuat kemampuan lemah. Oleh karena kemampuan lemah maka kemiskinan timbul. Demikianlah seterusnya, lingkaran ini berjalan sehingga kemiskinan bertambah parah.” Hal ini yang menyebabkan mengapa situasi *shared poverty* (kemiskinan yang ditanggung bersama) tidak dapat dikatakan masih dapat menimbulkan harmonis di pedesaan, karena kemiskinan yang ditanggung bersama ini hanya berjalan di kalangan massa miskin saja.”¹⁰

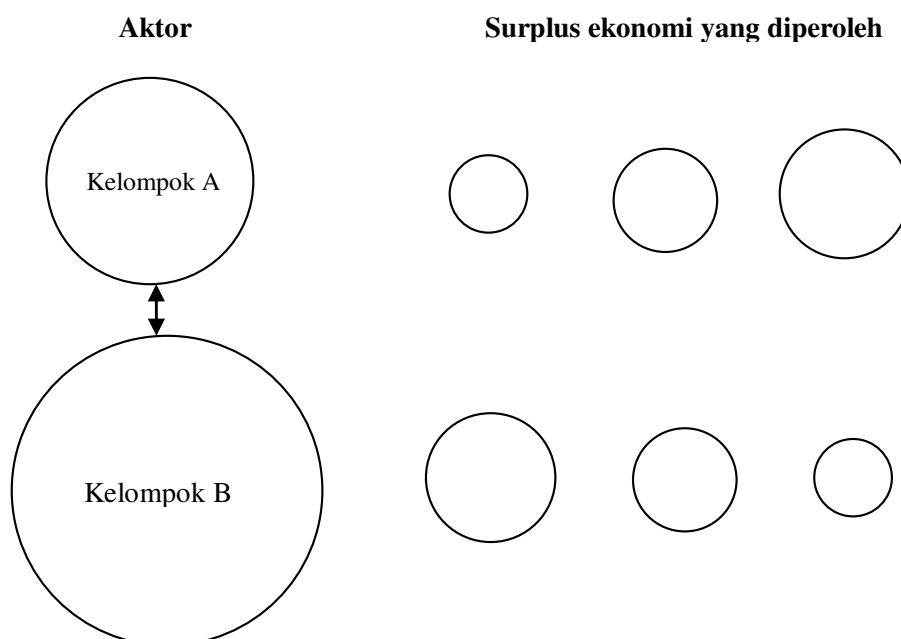
Skema 23.1. Aktor-aktor dalam Ekonomi Petani

⁹ Hisam Ahyani et al., “Implementasi Rahmatan Lil-Alamin Dalam Ekonomi Islam (Analisis Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Negara Tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah Dan Wakaf Tunai) Di Indonesia).” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (April 2022): 28.

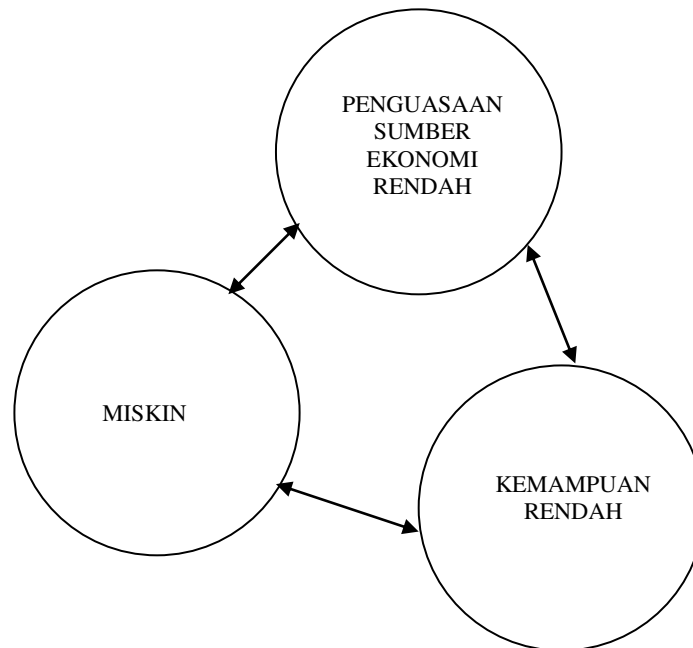
¹⁰ Baiq Tisniawati, “Analisis Faktor-Faktor Tingkat Kemiskinan Di Indonesia” (2012): 33–46, <https://media.neliti.com/media/publications/70641>.



Skema 23.2. Surplus Ekonomi dalam Ekonomi Petani



Skema 23.3. Lingkaran Kemiskinan



Kemiskinan yang ditanggung bersama di kalangan massa miskin membuat kemiskinan melembaga, sehingga menimbulkan kultur kemiskinan (*culture of poverty*). Kultur kemiskinan di kalangan massa miskin membuat lingkaran kemiskinan merupakan suatu lingkaran tidak berujung yang tumbuh dari dalam. Keadaan ini, yaitu keadaan kultur miskin dan statis ini, menimbulkan kesan bahwa massa miskin itu sebetulnya tidak ingin mengubah nasibnya. Kemiskinan mereka pandang sebagai suatu atribut permanen untuk mereka sehingga tidak dapat melihat mengapa mesti dipersalahkan. Lingkaran kemiskinan yang parah pun menjadi fenomena permanen. Faktor badaniah masyarakat miskin yang merupakan satu-satunya alat untuk memperoleh nafkah, sebagai akibat kemiskinan, telah menjadi faktor yang berkualitas sangat rendah sehingga sama sekali tidak dapat disebut *human capital*. Faktor badaniah mereka ini cenderung lebih mendekati “ampas” (*waste*) yang tidak dapat diharapkan mampu menimbulkan kegiatan produktif yang otonom dan langgeng.

Penjelasan di atas membuat kita mengambil kesimpulan bahwa kemiskinan rakyat kita bukanlah hanya merupakan suatu fenomena kemelaratan materi, tetapi telah merupakan suatu fenomena sosio-kultural yang lebih kompleks. Hal ini mengandung pengertian bahwa segala upaya untuk membangun masyarakat kelas bawah tidak hanya harus bertumpu pada pendekatan ekonomis, tetapi hendaklah juga mengikutsertakan pendekatan-pendekatan sosio-kultural.” (Sritua Arief; 1990).¹¹

PENJAJAHAN DI INDONESIA: YANG BERLANJUT DAN YANG BERUBAH

Sebagaimana yang sudah ditunjukkan pada skema sebelumnya, aktor penjajah yang diperankan oleh Belanda boleh saja tersingkir, akan tetapi keberlangsungannya yang diganti oleh aktor-aktor baru terjadi tanpa hambatan. Yang harus kita cermati dalam konteks penyelidikan tentang kontinuitas penjajahan yang bentuk utamanya ialah pemerasan dan penindasan terhadap rakyat di Indonesia, yaitu wujudnya adalah kolaborasi antara borjuasi Cina dengan tentara, kolaborasi mana menampilkan karakter yang aneh: di permukaan tampak kontradiksi, tapi di lapangan saling

¹¹ Bagus Adhitya, Agus Prabawa, and Heris Kencana, “Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (Maret 2022): 288.

melengkapi, saling menopang, saling berbagi peran, saling bertukar pengalaman yang membawa profit (yang tentara mempertukarkan pengalaman dan skill-nya dalam mengelola konflik dan keamanan, sedangkan yang Cina mempertukarkan pengalaman dan skill-nya dalam mengelola produksi, distribusi dan pasar), saling memberi dan saling bekerjasama secara strategis dan teknis dalam hal penguasaan dan monopoli terhadap sumber-sumber ekonomi strategis. Inilah kontinuitas penjajahan yang tidak dapat dilenyapkan. Pada akhirnya kedua kelompok kepentingan (*interest group*) ini berada satu blok dan satu paket berhadapan dengan mayoritas rakyat yang terhisap dan tertindas akibat kedudukan dan kegiatan ekonomi politik mereka. Kolaborasi kedua golongan ini terjadi secara intensif dan menjadi modus umum pada masa Orde Baru, dan masih terus terjadi hingga dewasa ini.¹²

Perlu ditambahkan di sini, pola kolaborasi yang mirip terjadi pula antara borjuasi Indonesia pada umumnya dengan birokrasi. Walhasil, secara singkat dapat diilustrasikan, bahwa terdapat tiga kelompok di dalam masyarakat Indonesia yang saling menopang dan mengambil keuntungan dari hubungan kolaboratif mereka, yaitu antara golongan yang menguasai senjata (tentara/polisi) dengan golongan yang menguasai keuangan dan pasar (kalangan pengusaha), serta golongan yang menguasai administrasi perijinan (birokrasi). Secara metaforik hubungan ini dapat disebut sebagai hubungan segitiga antara pemegang senjata, pemegang cek, dan pemegang stempel garuda. Ketiga golongan ini menghisap secara sistematis kekayaan penduduk dan hasil bumi dengan hanya menyisakan sedikit kue ekonomi untuk diperebutkan oleh mayoritas penduduk yang tertindas di bawah kaki ketiga golongan ini. Ketiga golongan inilah yang mengatur dan menguasai pasar, konsesi, lisensi, dan proteksi.¹³

Selamanya keadaan tak akan berubah, sebelum terjadi perubahan watak, mental dan orientasi dari ketiga *interest group* ini, atau saat mana rakyat terhisap dan tertindas itu memaksa perubahan. Yang disebut terakhir ini hanya bisa terjadi bilamana rakyat semakin menyadari keadaannya dan berani bertindak mengatasi keadaan yang membelitnya, tindakan mana diwujudkan dalam aksi organisasi secara teratur dan solid untuk keluar dari penindasan sistematis tersebut.¹⁴

A. Asal Mula Kolaborasi

Peranan etnik Cina dalam perekonomian Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Pada era sebelum penjajahan saja, di Kerajaan Banten, penanggung jawab ekspor impor kerajaan itu berada di tangan seorang etnik Cina. Pada saat Belanda menancapkan kuku penjajahannya, segregasi sosial dalam bidang ekonomi dan hukum dikembangkan. Kebijakan itu berbentuk piramid, bangsa Belanda dan Eropa berada di puncak, diikuti oleh bangsa Cina, Arab dan Timur lainnya, dan bangsa-bangsa lokal nusantara, berada di bawah. Hal ini berlaku dalam perlakuan di depan hukum.¹⁵

Tentu saja hal ini merupakan kebijakan terencana dari penjajah untuk mengontrol dan melanggengkan penjajahannya. Etnik Cina, Arab, dan Timur lainnya ditempatkan sebagai perantara ekonomi oleh pihak Belanda-Penjajah kepada pribumi yang ditindas. Belanda sendiri sebagai pengatur dan pemberi izin usaha. Tapi bukan berarti pihak penjajah tidak memiliki lapangan usaha. Usaha-usaha skala besar, strategis dan umumnya ekspor, dikuasai oleh Belanda. Di lapisan bawah sekali dari struktur sosial

¹² Jefik Zulfikar Hafizd, "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (Juli 2021).

¹³ Ibid.

¹⁴ Audi Anugrah, Abdul Malik Karim Amrullah, and Muhammad Inâ€™am Esha, "Tipologi Manajemen Tradisional Dan Modern Dan Klasifikasinya Dalam Manajemen Pendidikan Islam." *Journal of Islamic Education : The Teacher of Civilization* 3, no. 1 (Desember 2022): 1–19.

¹⁵ Nur Hadi et al., "Relevansi Konsep Rahmatan Lil ‘Alamin Terhadap Toleransi Beragama." *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (Juni 2023): 21–29.

masyarakat penjajahan, terdapatlah etnik-etnik lokal, seperti Jawa, Sunda, Melayu, Minang, Bali, Batak, dst. Lapisan bawah inilah yang diperas tenaga dan hasil-hasil ekonominya dengan serangkaian kebijakan penjajahan, mulai dari pajak yang berat, kerja paksa, tanam paksa, dipersempit peluang mobilitas vertikalnya, dst.¹⁶

Seiring waktu, era kekuasaan Belanda dipaksa bubar, karena memang tidak ada hak sejarahnya. Kemudian masuklah era kemerdekaan. Pos-pos kekuasaan yang ditinggalkan Belanda, diambil alih oleh orang-orang lokal pribumi. Orang-orang lokal pribumi yang kebanyakan berorientasi anti penjajahan, mencoba menghapus sistem kasta ekonomi sosial—disebut dengan agenda demokratisasi ekonomi—yang ditinggalkan oleh Belanda tersebut. Namun mereka sepenuhnya tidak berhasil. Malah pada era 1950-an, belum satu dekade Indonesia dapat mengusir Belanda, sistem ekonomi yang ditinggalkan oleh Belanda tersebut, malah bengkit kembali. Perusahaan-perusahaan swasta tumbuh di mana-mana. Perusahaan-perusahaan besar peninggalan Belanda dinasionalisasi hanya dengan bentuk mengganti merek dan penanggung jawab saja. Mereka dengan istilah Indonesia, penanggung jawabnya kebanyakan dilimpahkan kepada tentara. Wajar saja, jika akhirnya iktikad demokratisasi ekonomi itu lesu seiring dengan pribumi-pribumi yang mulai belajar merasakan nikmatnya kapitalisme yang sebelumnya kedudukan mereka hanya berada sebagai injakan kapitalisme. Mereka, pribumi-pribumi itu yang kebanyakan tentara, di era 1950-an, era nasionalisasi perusahaan-perusahaan *ghanimah* Belanda, belajar menjadi kapitalis.¹⁷

Rupanya menjadi kapitalis itu sungguh enak dan nikmat. Duit berlimpah dan kekuasaan politik diraih dengan mudah tanpa harus basah kuyup kehujanan bersama rakyat. Tinggal perintah dan kontrol sistem perusahaan, rakyat yang susah berak-arak mempersembahkan dirinya untuk dieksploitasi oleh si pribumi yang sudah duduk menjadi majikan. Tentulah dengan kedudukan sebagai majikan-kapitalis itu, mereka bergaul erat dengan sesama majikan-kapitalis etnik Cina, baik karena kesamaan kepentingan ekonomi maupun dalam rangka pembagian peran dalam mengoperasikan perusahaan yang merupakan pengalaman baru bagi para tentara yang umumnya pribumi tersebut, maka secara otomatis terbentuklah aliansi dan kolaborasi, kepentingan dan perasaan bersama, dan kelas yang sama, antar pribumi yang mendadak kapitalis itu dengan Cina-kapitalis yang sudah terbina dengan baik dari zaman Belanda berhadapan dengan rakyat yang masih terhuyung-huyung tidak bisa naik kelas. Pada era 1950-an inilah, era demokrasi liberal, benih kapitalisme tentara tumbuh, dan kemudian melenyapkan kekuasaan Soekarno, lalu kemudian mendirikan kekuasaan kapitalisme-paksa yang berlangsung selama 32 tahun. Sistem kapitalisme-paksa ini semata-mata ditopang oleh pilar kekuasaan pemaksa dari tentara dan kekuatan keterampilan dan sumberdaya ekonomi dari orang-orang Cina kapitalis. Kedua golongan ini benar-benar saling membutuhkan dan saling melengkapi. Sektor keamanan dan perizinan yang menjadi pra kondisi dapat digelarnya operasi kapitalisme digenggam oleh tentara, sedangkan sektor bisnis yang menjadi praktik *day to day* kapitalisme dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang Cina kapitalis yang kebanyakan dipilih dan rekrut oleh penguasa Orde Baru. Dan harus diingat, kolaborasi ini memang memiliki alasan politis, yaitu persis seperti alasan penjajah Belanda di masa silam ketika meletakkan borjuasi Cina sebagai perantara ekonomi sekaligus sapi perah kekuasaan.

Seiring waktu, orang-orang Cina kapitalis hasil proteksi rezim Soeharto tersebut, berkembang pesat menjadi kapitalis raksasa yang bersifat monopoli dan oligarki. Group Salim, Sinar Mas, Astra, Raja Garuda Mas, Ciputra, Lippo, Gajah Tunggal, Sampoerna, Djarum, Gudang Garam, dll merupakan contoh nyata dari hal ini. Tapi rupanya setelah keruntuhan Soeharto-Orde Baru, rekonsolidasi dan rekonfigurasi antara dua golongan ini memperlihatkan gejala baru bahwa konglomerasi Cina tidak selamanya

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

bertempat menjadi subordinasi dari tentara dan aparat negara, malahan sebaliknya. Setidaknya pada beberapa kasus, berlaku sebagai “Co-Chairman”. Gejala yang lain, beberapa eks Jenderal Orde Baru mengembangkan bisnisnya sendiri terpisah dari sekondan Cina mereka. Bukan tidak mungkin di masa mendatang, dari “Co-Chairman” berubah menjadi Chairman tunggal bilamana proses integrasi kapital konglomerat Cina ini semakin solid, baik di tingkat nasional maupun global. Nyawa dan kekuatan mereka terletak pada kapital semata, tidak pada dukungan politik riil dari rakyat. Hanya dengan usaha manipulasi dukungan rakyat lewat penguasaan terhadap saluran informasi dan komunikasilah, mereka dapat langgeng berkuasa, dan tentu saja karena dibantu oleh oportunistis-nasional sendiri.¹⁸

B. Pola-pola Kolaborasi

Di masa Orde Baru, masa puncak kejayaan kekuasaan militer Indonesia, segala hal yang berurusan dengan bisnis besar, hampir tidak mungkin tanpa melibatkan militer. Terutama untuk urusan proteksi dan keamanan. Dan rasanya pola ini belum sepenuhnya hilang, meskipun era sudah berubah. Mungkin intensitasnya yang sedikit menurun.

Sudah bukan rahasia lagi, oknum tentara jika memiliki lahan bisnis, lebih suka menyewakan lahannya kepada pengusaha-pengusaha Cina. Kenapa? Ini soal psikologis. Bagi kalangan tentara, pengusaha-pengusaha Cina lebih gampang untuk ditagih dan lebih mudah untuk diperas dari pada pengusaha-pengusaha pribumi. Sebaliknya, pengusaha-pengusaha Cina merasa nyaman berada dalam proteksi tentara, karena dapat melindungi mereka dari pemerasan preman-preman pribumi. Bagi mereka, biarlah membayar lebih mahal, asal tidak diperas oleh pribumi yang lain. Tapi mereka juga tidak mau selamanya berada dalam pemerasan tentara. Untuk hal itu, mereka memeras balik karyawannya yang kebanyakan pribumi atau meningkatkan harga komoditas yang mereka perdagangkan. Jadilah hal ini semacam siklus pemerasan yang tak berkesudahan (*tasalsul*). Ibaratnya, tentara memeras pengusaha Cina, pengusaha Cina memeras buruh pribumi, buruh pribumi melahirkan tentara. Kemudian, tentara balik memeras pengusaha Cina. Demikian seterusnya. Inilah bentuk penjajahan yang terus dirawat oleh bangsa ini dengan apa yang disebut penjajahan internal.¹⁹

Secara singkat penjajahan internal dapat dijelaskan sebagai berikut: penguasa, dalam hal ini pemerintah yang didominasi oleh pribumi dan dalam beberapa kasus, tentara masih memainkan peranan, mengkomersilkan izin dan proteksinya. Izin dan proteksi itu ditebus oleh pengusaha dengan memberikan upeti dan konsesi kepada pejabat pemberi proteksi dan izin. Untuk menutupi biaya upeti dan konsesi yang mahal itu, mengeksploitasi buruh, masyarakat konsumen dan lahan bisnis merupakan langkah yang masuk akal bagi pengusaha yang didominasi oleh etnik Cina. Mereka dengan cerdik memainkan strategi berpijak dan membelit ke dua leher: kepada buruh dan rakyat-kebanyakan, mereka memeras dan membikin ketergantungan ekonomi, sedangkan kepada pejabat, mereka menciptakan candu pelayanan ekstra dan upeti yang tak terbatas. Inilah bentuk kapitalisme korup khas Indonesia pasca Soekarno. Maka tepatlah ungkapan masyhur, Belanda boleh henggang dari Nusantara, tapi sistem penjajahannya dilanjutkan oleh aparat negara.²⁰

¹⁸ Hafizd, “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern.”

¹⁹ Muhammad Suryadi, “Moderasi Beragama Sebagai Kerangka Paradigma Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin.” *Educandum* 9, no. 1 (Juni 2023): 53–62.

²⁰ Muhamad Mufid, “Penguatan Moderasi Beragama Dalam Proyek Profil Pelajar Rahmatan Lil ’alamin Kurikulum Merdeka Madrasah.” *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (Februari 2023): 141–154.

Apakah Implikasi Yang Ditimbulkan Oleh Konsentrasi Kapital pada Segelintir Pihak?

Kolaborasi kedua golongan ini yang bertujuan untuk mengkonsentrasikan kekuasaan modal telah menimbulkan akibat buruk bagi kehidupan mayoritas rakyat Indonesia. Kemiskinan, kurangnya pendidikan, kualitas hidup yang buruk, dan seluruh gejala sosial yang berakar dari kondisi kemiskinan seperti kriminalitas merupakan akibat yang langsung dari kapitalisme yang ditopang oleh kolaborasi aparatus negara dan golongan kapitalis.

Dalam hal ini, gambaran kehidupan buruh kecil dapat kita tunjukkan sebagai contoh riil. Misalnya, seorang buruh yang hanya memperoleh pemasukan dari upah atau lembur, atau juga mengambil kesempatan dari waktu istirahat yang tersisa untuk *narik ojek*, sedangkan pengeluaran wajib terdiri dari bermacam-macam: biaya kebutuhan makan yang bersangkutan dan anggota keluarga, biaya pendidikan anak, biaya kebutuhan pakaian, tempat tinggal, tagihan listrik, tagihan air, pulsa hp, iuran lingkungan rumah (biaya sosial RT dan RW), iuran keanggotaan buruh, sewaktu-waktu biaya pengobatan jika yang bersangkutan atau anggota keluarganya sakit, biaya kemalangan, biaya bahan bakar kendaraan, tagihan kredit kendaraan (kebanyakan membeli kendaraan secara kredit), biaya konsumsi rokok (kebanyakan buruh merupakan konsumen rokok yang rutin), dan kadang-kadang biaya tak terduga jauh lebih besar, seperti biaya bepergian karena urusan tertentu yang tidak bisa ditangguhkan.²¹

Di bawah ini diuraikan perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran pada rata-rata buruh yang berkeluarga.

²¹ Ahyani et al., “Implementasi Rahmatan Lil-Alamin Dalam Ekonomi Islam (Analisis Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Negara Tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah Dan Wakaf Tunai) Di Indonesia).”

Pemasukan (<i>Income</i>)	Pengeluaran (<i>Belanja</i>)
1. Upah (rutin) 2. Lembur (kadang-kadang) 3. <i>Narik Ojek</i> (Memanfaatkan sisa waktu) 4. Jualan/dagang (Memanfaatkan sisa waktu)	1. Biaya kebutuhan makan yang bersangkutan dan anggota keluarga (rutin) 2. Biaya pendidikan anak (rutin) 3. Biaya kebutuhan pakaian (periodik) 4. Biaya tempat tinggal (rutin) 5. Biaya tagihan listrik (rutin) 6. Biaya kredit kendaraan (kebanyakan membeli kendaraan secara kredit/rutin) 7. Biaya tagihan air (rutin) 8. Biaya gas (rutin) 9. Biaya pulsa hp (rutin) 10. Biaya iuran lingkungan rumah (biaya sosial RT dan RW/rutin) 11. Biaya iuran keanggotaan buruh 12. Biaya pengobatan jika yang bersangkutan atau anggota keluarganya sakit (insidental) 13. Biaya kemalangan 14. Biaya bahan bakar kendaraan (BBM/rutin) 15. Biaya konsumsi rokok (kebanyakan buruh merupakan konsumen rokok yang rutin) 16. Biaya tak terduga yang angkanya dapat lebih besar dari pada biaya rutin, seperti biaya bepergian karena urusan tertentu yang tidak bisa ditangguhkan.
PEMASUKAN LEBIH KECIL	PENGELUARAN LEBIH BESAR

Dengan gambaran di atas, jelas sekali total pengeluaran jauh lebih besar ketimbang total pemasukan bagi seorang buruh. Walhasil kemiskinan itu terjadi manakala pengeluaran wajib beraneka macam dengan volume yang bermacam pula, sedangkan pemasukan hanya satu jalur atau lebih dengan volume yang lebih kecil dan fix dari volume pengeluaran. Karena itulah, jika tidak ada cara revolusioner secara pemasukan, maka buruh yang bersangkutan selamanya terjebak dalam lumpur hisap kemiskinan. Atau karena situasi yang berubah atas desakan politik sehingga kehidupan buruh yang sulit itu dapat diatasi.²²

Kapitalisme Mengarahkan Pertarungan Ke Sesama Yang Terhisap

Baik feodalisme maupun kapitalisme telah membuat suasana hubungan antara individu di dalam masyarakat bersifat konflik dan saling bertarung untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Karena dengan suasana demikianlah, para tuan tanah maupun pemilik kapital dapat mengontrol rakyat mayoritas dan secara otomatis menempatkan

²² Tenrinippi, "Kewirausahaan Sosial Di Indonesia (Apa , Mengapa , Kapan , Siapa Dan Bagaimana)."

para tuan tanah dan pemilik kapital dalam kedudukan istimewa dan berkuasa di dalam masyarakat. Pada umumnya sistem yang adil dan rasional menyerukan suasana masyarakat zalim semacam itu harus dihancurkan dan diratakan.

Sistem yang adil menghendaki suasana masyarakat yang tidak khawatir hak hidupnya yang layak tercuri dan terampas oleh orang lain yang lebih kuat dari dirinya. Hak asasi tersebut dijamin adanya, kecuali pada negara yang dikangkangi oleh para penimbun kapital. Pertarungan sesama rakyat dalam memperoleh penghidupan yang layak itu sudah sewajarnya diakhiri dengan menyadarkan rakyat kecil tersebut bahwa mereka sebenarnya keliru jika harus bertarung sesama mereka. Mereka tidak pantas saling berlawanan hanya untuk memperoleh penghidupan yang layak. Lawan mereka sesungguhnya ialah para monopoli dan penimbun kapital. Ke sanalah pandangan mereka mustinya diarahkan.

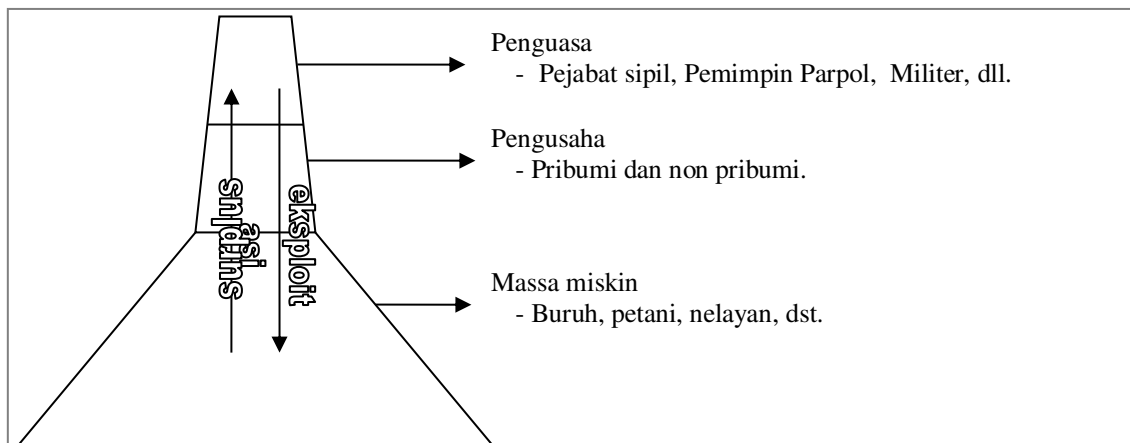
Karena itu sesama mereka harus bersatu dan bersama-sama merebut hak hidup layak mereka yang disembunyikan dan dirampas diam-diam dan sistematis oleh para pemilik kapital yang pada umumnya berkedudukan sebagai majikan mereka.²³

PERANG EKONOMI

“Hukum Besi Sejarah menyatakan: Yang terkuatlah yang menentukan, karena itu kekuatan musti dilawan dengan kekuatan pula.

Hukum Besi Ekonomi menyatakan: Modal dan property lebih penting bagi pemiliknya daripada nasib orang lain.”

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, terlihat dengan jelas bahwa terdapat segelintir golongan yang diuntungkan dengan sifat susunan ekonomi Indonesia yang hirarkis dan eksploitatif tersebut. Mengingat fase historis kita hari ini berada dalam masa sesudah kemerdekaan, maka mereka yang diuntungkan dari sifat susunan ekonomi tersebut ialah terdiri atas para pejabat/penguasa sipil, militer, dan pengusaha yang mayoritas Non Pribumi. Sedangkan massa miskin hanya menjadi korban seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah, diagram mana menunjukkan semakin ke atas semakin kecil jumlahnya, semakin ke bawah semakin besar. Dari atas ke bawah sifat hubungannya eksploitatif, sedangkan dari bawah ke atas, bersifat surplus.²⁴



Gambar 1: Bentuk Diagram Kemiskinan Berbentuk Corong Terbalik

²³ Choirul Huda, “EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME (Merunut Benih Kapitalisme Dalam Ekonomi Islam).” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (Mei 2016): 27–49.

²⁴ Agus Adhari, “Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no. 1 (November 2020): 031–048.

Sudah barang tentu apabila dilaksanakan perombakan besar-besaran terhadap susunan ekonomi tersebut, perombakan mana ditujukan untuk menguntungkan massa yang berada di lapisan bawah, tapi secara tak terelakkan menghancurkan keamanan posisi lapisan ekonomi atas. Bahkan sebelum hal itu terjadi, pembentengan dilakukan sedemikian rupa dengan cara kolaborasi antara dua lapisan atas (pengusaha dan penguasa). Studi kasus masyarakat Kediri yang secara perlahan perekonomian setempat memusat ke perusahaan Gudang Garam dimana dalam rangka memapankan keberadaan Gudang Garam, instalasi-instalasi militer didirikan tersebar sedemikian rupa. Sulitlah dibantah bahwa keberadaan instalasi militer yang cukup besar di wilayah sekecil Kediri tersebut berguna untuk memproteksi kedudukan dan kepentingan Gudang Garam. Ini menunjukkan bahwa tangan-tangan negara dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kepentingan privat lapisan ekonomi atas.²⁵

Tidak hanya sampai di situ, pengaruh Gudang Garam merambah ke wilayah kultural. Pesantren Lirboyo, suatu lembaga reproduksi kultural yang terpenting di masyarakat Kediri, tertaklukkan sedemikian rupa oleh kepentingan perusahaan rokok raksasa tersebut dengan memaklumkan praktik konsumsi rokok di lembaga religius pendidikan yang sepatutnya melarang konsumsi rokok di lingkungan pesantren. Dari sudut kepentingan Gudang Garam, jadilah hal itu sebagai benteng yang kokoh atas kedudukannya di dalam masyarakat Kediri. Hal yang tidak habis pikir, Gudang Garam hanyalah perusahaan swasta milik keluarga Cina yang berbeda dengan masyarakat Kediri yang dominan Jawa, selain itu statusnya pun bukan milik negara, namun kokoh sedemikian rupa di dalam tatanan masyarakat Kediri. Tentulah sudah tidak terhitung banyaknya cara yang ditempuh oleh Gudang Garam untuk mengokohkan kedudukannya itu.²⁶

Alhasil, tersingkaplah kenyataan bahwa sedemikian rupa usaha yang dilakukan oleh lapisan ekonomi atas untuk mempertahankan kedudukannya, sekalipun menempuh cara kolaborasi antara elemen pertahanan keamanan negara, ditambah elemen kultural-religius, yaitu pesantren Lirboyo, dan tentu saja perusahaan Gudang Garam sendiri sebagai pemain utama. Kolaborasi segitiga elemen ini pun pada kenyataannya hanya menguntungkan segelintir elit-elit pada masing-masing elemen tersebut.²⁷

Pertanyaannya kemudian, apakah yang harus dilakukan untuk mematahkan belenggu penghisapan dan pemerasan yang bersifat ekonomi yang dialami oleh lapisan ekonomi bawah tersebut sehingga martabat kemanusiaan mereka terangkat secara wajar? Beberapa pihak bermimpi bahwa hal itu dapat dilakukan ketika kebijakan pemerintah pro terhadap lapisan ekonomi bawah. Persoalannya, apakah pemerintah merupakan representasi kepentingan politik lapisan ekonomi bawah, padahal kenyataannya, baik melalui mekanisme demokrasi seperti pemilu ataupun mekanisme penunjukan langsung penguasa, pemerintah lebih sebagai penjaga kepentingan lapisan ekonomi atas, kalau bukan jongsos dan centeng lapisan ekonomi atas.

Belajar dari semua itu, hanya tersedia cara yang logis bagi lapisan ekonomi bawah untuk membebaskan diri mereka dari belenggu pemerasan ekonomi tersebut yang membuat mereka menjadi lumpuh. Cara itu ialah Perang Ekonomi berbasiskan kelas sosial. Sudah selayaknya melempar jauh cara-cara yang lembut dan penuh dengan sopan santun. Semua itu hanya ilusi dan cuma berlaku dalam suasana ekonomi yang bersifat setara dan tidak eksploitatif. Kenyataannya hubungan ekonomi antara dua lapisan berlangsung secara timpang dan eksploitatif. Lapisan ekonomi bawah yang

²⁵ Arsil Tanjung, Wayan Midhio, and Kurniawan Firmuzi Syarifuddin, "Kajian Literatur: Penerapan Strategi Perang Semesta Dalam Perang Asimetris Yang Dilakukan Oleh Indonesia." *Strategi Perang Semesta* 7, no. 2 (2021): 144–160, <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPS/article/view/685>.

²⁶ Adhari, "Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia."

²⁷ Tanjung, Midhio, and Syarifuddin, "Kajian Literatur: Penerapan Strategi Perang Semesta Dalam Perang Asimetris Yang Dilakukan Oleh Indonesia."

terhisap itu semestinya segera menggeser status hubungan ekonomi mereka dengan lapisan ekonomi atas, dari status damai menjadi status perang. Toh selama ini, secara de facto dan diam-diam tanpa diakui sekalipun, lapisan ekonomi atas memberlakukan praktik perang terhadap lapisan ekonomi bawah. Bukti mereka menerapkan perang terhadap lapisan ekonomi bawah, yakni sifat eksploitatif hubungan ekonomi yang mereka tegakkan.²⁸

Bagaimana Wujud Perang Ekonomi?

Perang ekonomi yang penulis maksudkan ialah perang ekonomi berdasarkan kelas sosial. Sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya, dalam susunan ekonomi yang terbangun itu, berdiri secara hirarkis, berlapis secara eksploitatif. Bila selama ini lapisan ekonomi bawah nyaris terkontrol secara penuh oleh lapisan ekonomi atas, maka saatnya tiba mereka membuat perhitungan. Lapisan ekonomi bawah yang terdiri atas beragam peran dan posisi, menyatukan diri dalam satu front tersendiri kontra lapisan ekonomi atas. Keragaman peran dan posisi mereka, meskipun terkotak di dalam lapisan ekonomi bawah, tetap dapat diandalkan sebagai modal yang besar untuk pertukaran barang/jasa antar sesama mereka selama perang ekonomi itu dilangsungkan sembari memperkuat dan memperbesar potensi lapisan ekonomi bawah ini.

Lapisan ekonomi bawah ini harus menyadari fungsi mereka bagi kelangsungan hidup eksistensi dan posisi lapisan ekonomi atas. Lapisan ekonomi bawah ini karena jumlahnya yang besar, ia merupakan pasar sekaligus tenaga-tenaga yang menggerakkan mesin-mesin produksi milik lapisan ekonomi atas. Tanpa peranan lapisan ekonomi bawah ini, roda produksi lapisan ekonomi atas akan macet dengan sendirinya. Jika roda produksi ekonomi atas tersebut macet, maka kekuasaan mereka atas lapisan ekonomi bawah runtuh dengan sendirinya. Begitu runtuh, maka lapisan ekonomi atas tak ada artinya lagi. Mereka tak ubahnya hanyalah ulat-ulat yang lemah dan rawan untuk hancur. Mereka tidak terlatih hidup secara keras dan prihatin sebagaimana lapisan ekonomi bawah. Daya tahan mereka dalam kondisi prihatin tak ada apa-apanya dibandingkan daya tahan lapisan ekonomi bawah. Kekuatan mereka hanya terletak pada kepemilikan modal, sindikasi pasar, dan alat-alat produksi. Tapi seperti yang diuraikan di atas, apakah mereka sendiri mampu mengoperasikan alat-alat produksi dan memasarkan produk-produk yang mereka miliki itu tanpa melibatkan tenaga lapisan ekonomi bawah yang banyak mereka libatkan dalam operasi perusahaan mereka.²⁹

Di sinilah hendaknya lapisan ekonomi bawah harusnya menyadari kekuatan yang ada pada mereka di hadapan lapisan ekonomi atas tersebut. Sekiranya lapisan ekonomi bawah ini solid bersatu menghadapi kekuatan lapisan ekonomi atas, pastilah lapisan ekonomi atas itu tak bisa melawan. Hanya saja persoalan persatuan di kalangan lapisan ekonomi bawah ini belum terbangun dengan baik, maka mereka gampang dikuasai oleh lapisan ekonomi atas.

Mengingat hubungan sosiologis antara lapisan ekonomi bawah dengan lapisan ekonomi atas adalah dalam kondisi perang, baik secara diam-diam maupun terang-terangan—status perang ini tidak boleh diragukan bagaimana pun seperti yang sudah ditunjukkan di uraian awal—maka lapisan ekonomi bawah dapat mengambil beberapa aksi/tindakan terhadap lapisan ekonomi atas dalam rangka mengakhiri eksploitasi yang menderitakan mereka. Aksi-aksi tersebut dapat dilaksanakan secara serentak maupun bertahap-tahap, tergantung penilaian atas keadaan. Aksi-aksi tersebut memiliki daya rusak terhadap kekuasaan lapisan ekonomi atas.³⁰

²⁸ Adhari, “Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia.”

²⁹ Huda, “EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME (Merunut Benih Kapitalisme Dalam Ekonomi Islam).”

³⁰ Adhari, “Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia.”

1. Boikot

Boikot ialah suatu tindakan untuk memutus hubungan timbal-balik secara ekonomi terhadap musuh, dalam hal ini yang dimaksud ialah lapisan ekonomi atas. Tindakan ini sudah dipraktikkan manusia sejak lama. Dan sudah lama orang tahu betapa dahsyatnya akibat yang ditimbulkan suatu aksi boikot. Dalam konteks pembahasan perang yang dilancarkan oleh lapisan ekonomi bawah terhadap lapisan ekonomi atas yang telah memeras, menghisap dan mengeksploitasi mereka, boikot yang dilancarkan ialah:

- Berhenti membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh lapisan ekonomi atas
- Berhenti mengonsumsi dan menggunakannya

Sebab bagaimana pun sasaran pasar dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan milik lapisan ekonomi atas tersebut, sebagian atau tidak, pastilah ditujukan untuk pasar yang luas, termasuklah di dalam sasarannya itu pasar lapisan ekonomi bawah. Bila aksi boikot ini dilaksanakan secara terorganisir, serentak dan tanpa ampun, dapat dipastikan akan memukul dan mengguncang kekuasaan lapisan ekonomi atas terhadap lapisan ekonomi bawah. Apalagi bila diiringi pula dengan kampanye boikot produk mereka, maka sudah barang tentu hal itu akan mengguncang dan merembet ke sesama mereka sebagai golongan lapisan ekonomi atas. Sembari melancarkan aksi boikot tersebut, lapisan ekonomi bawah berusaha menyediakan alternatif produk yang mereka boikot. Sebaiknya alternatif produk tersebut merupakan hasil dari produksi bersama lapisan ekonomi bawah.

2. Mogok

Senjata ampuh berikutnya yang dimiliki oleh lapisan ekonomi bawah untuk memukul kekuasaan lapisan ekonomi atas ialah mogok. Mogok berarti berhenti menjalankan perintah-perintah pemilik perusahaan. Dalam konteks pabrik atau perusahaan, berhenti melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam rangka menjalankan roda perusahaan. Ibaratnya, roda perusahaan yang seharusnya berputar secara rutin, dihentikan dengan sengaja oleh para petugas/pekerjanya, meskipun pihak manajemen dan pemilik perusahaan tidak menginginkannya.

Tindakan mogok ini pada dasarnya sama dengan tindakan PHK massal, yakni sama-sama menghentikan roda perusahaan atau jalannya produksi. Bila mogok tindakan itu berasal dari bawah, yaitu para pekerja, sedangkan PHK, tindakan itu berasal dari pemilik perusahaan yang diatur oleh manajemen. Aksi mogok ini hanya mampu memukul kekuasaan lapisan ekonomi atas sebagai pemilik perusahaan apabila dilaksanakan oleh lapisan ekonomi bawah secara serentak, bersatu dan tanpa takut.

Jika sasaran boikot ialah produk jadi untuk tidak membelinya, maka mogok sasarannya adalah roda produksi sehingga berhenti berproduksi. Semimim-minimnya hasil tindakan mogok, ialah mengubah jadwal produksi. Tapi sudah pasti hal itu merugikan bagi pemilik perusahaan. Memang pada kenyataannya bahwa maksud dari aksi mogok tersebut adalah untuk memukul kekuasaan si pemilik perusahaan sebagai bagian dari lapisan ekonomi atas.

Tindakan semacam ini harus dilaksanakan dengan keras, tegas, tanpa mengenal ampun apalagi belas kasihan. Sebab tindakan lapisan ekonomi atas itu jauh lebih kejam dan keras terhadap lapisan ekonomi bawah. Mereka sama sekali tidak menghiraukan terjadinya eksploitasi dan pemerasan sistematis terhadap lapisan ekonomi bawah. Lagi-lagi yang penting untuk diinsyafi oleh lapisan ekonomi bawah ialah keadaan mereka yang berada sebagai sumber hisapan dan eksploitasi permanen, dan hal itu hanya bisa diatasi dengan menghantam dan menghancurkan langsung kekuasaan dan kedudukan lapisan ekonomi atas, si penghisap mereka. Hubungan ekonomi yang eksploitatif itu harus dirontokkan, diganti dengan merekonstruksi dengan bentuk hubungan baru yang masing-masing setara, sukarela, dan penuh dengan berbagai pilihan. Tidak

diperkenankan hadirnya susunan ekonomi dan sosial yang bersifat hirarkis-tertutup-melembaga. Jika ada, harus dihancurkan dengan senjata boikot dan mogok dari lapisan ekonomi bawah.³¹

3. Blokade

Blokade ialah suatu usaha untuk menghadang atau menghalangi masuknya musuh ke suatu wilayah tertentu. Misalnya dalam konteks distribusi barang yang akan dilakukan oleh musuh ke suatu wilayah tertentu, maka dihadang atau dihalangi sedemikian rupa agar barang tersebut tidak sampai ke tujuan.

Langkah praktisnya misalnya, suatu perusahaan X yang diletakkan sebagai musuh, mengirimkan sebuah truk berisi sejumlah barang yang ditujukan ke agen atau perusahaan pembeli atau perusahaan penampung di wilayah yang dikuasai oleh organisasi lapisan ekonomi bawah, maka dihadang dan dihalangi di tengah jalan sehingga tidak berhasil sampai ke tujuan. Hasilnya ialah arus barang yang diatur oleh musuh menjadi kacau balau yang mengakibatkan kerugian besar bagi mereka.

Aksi blokade ini dapat dibagi dua: blokade ofensif dan blokade defensif. Blokade ofensif seperti perintangan dan penghadangan di tempat-tempat yang jauh dari basis lapisan ekonomi bawah. Ini mirip seperti aksi sabotase. Namun sabotase yang umum diketahui ialah dengan maksud merusak fasilitas musuh yang penting supaya musuh menjadi lemah. Sedangkan blokade ofensif adalah merusak jalur pihak musuh agar musuh tidak dapat menjangkau tujuannya.

Adapun blokade defensif yaitu apa yang dikenal dengan blokir. Membentengi basis pertahanan agar musuh tidak dapat menjangkau. Ini seperti membangun parit pertahanan sambil menunggu musuh datang mendekat.

Kedua aksi blokade ini dilakukan setelah aksi damai boikot dan mogok memerlukan usaha lebih dengan daya rusak bagi musuh.

4. Penghancuran

Langkah berikutnya untuk mematahkan kekuatan musuh ialah penghancuran. Penghancuran ditujukan pada pusat kekuatan musuh. Mengingat yang dibicarakan ialah perang ekonomi, maka haruslah diidentifikasi oleh lapisan ekonomi bawah dimana letak pusat kekuatan pihak musuh tersebut. Jangan mengambil sasaran yang sia-sia yang bukan merupakan pusat kekuatan pihak musuh, karena hal itu hanya buang-buang tenaga saja. Dan jangan berpikir dengan membunuh pabrik-pabrik dan properti-properti yang dimiliki musuh maka akan dicapai kesuksesan, itu sama sekali keliru di zaman di mana sistem asuransi berlaku.

Kekuatan ekonomi musuh juga tidak selalu berada di tangan manajemen atau pemilik perusahaan. Jadi perlu dengan cermat mengidentifikasi dimana letak kekuatan dan kelemahan musuh secara ekonomi. Itulah mengapa dua aksi saja dilakukan, boikot dan mogok, sudah benar-benar berdampak signifikan bagi kekuatan ekonomi musuh.

Pendeknya, langkah penghancuran ini diambil apabila langkah pertama, kedua dan ketiga gagal. Atau saat dihadapkan pilihan hidup mati.

Namun hendaklah diingat, serangkaian aksi di atas hanya efektif manakala organisasi dan persatuan di lapisan ekonomi bawah telah terbentuk dan terbina dengan baik dan solid. Di bawah ini akan diuraikan bagaimana membangun organisasi dan persatuan di kalangan lapisan ekonomi bawah sebagai golongan mayoritas di dalam masyarakat kapitalistik.

³¹ Ari Hernawan, "Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dan Pengusaha Dalam Mogok Kerja." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 3 (Oktober 2013): 418.

PERSATUAN

Lapisan ekonomi bawah merupakan senyata-nyatanya rakyat mayoritas. Ada yang bekerja sebagai petani kecil, buruh tani, buruh pabrik, buruh perkebunan, buruh pertambangan, karyawan kontrak, pegawai rendahan, tentara dan polisi berpangkat rendah, pedagang kaki lima, nelayan kecil, dan pekerjaan-pekerjaan informal lainnya yang hasil kerja dalam sebulan hanya cukup untuk bertahan hidup. Di kota-kota mereka hidup dalam rumah-rumah petakan, kontrakan, rusun, dan di desa-desa hidup di rumah sederhana layaknya gubuk. Inilah wajah umum rakyat mayoritas yang terhisap dan tertindas. Lapisan ekonomi bawah yang jumlahnya ratusan kali bahkan ribuan kali dari lapisan ekonomi atas, hanya akan berhasil menghancurkan belenggu yang dirantaikan oleh lapisan ekonomi atas ke leher mereka, manakala mereka bersatu, sesolid-solidnya. Perkara inilah yang paling penting dan mendesak bagi agenda lapisan ekonomi bawah.

Lapisan ekonomi atas selalu berusaha menceraikan-beraikan mereka agar gampang dikuasai. Kalau pun didorong bersatu, bukan pada misi persatuan yang dilandasi rasa senasib sepenanggungan, tapi persatuan yang diarahkan untuk urusan keuntungan, efisiensi produksi. Lapisan ekonomi atas tahu persis manakala lapisan ekonomi bawah menginsyafi penderitaan mereka—sadar akan perbedaan kepentingan antara mereka dengan pemilik perusahaan dimana mereka menghabiskan umur dan tenaga--sekonyong-konyong lapisan ekonomi atas pasti berusaha mencegah ke arah itu dengan berbagai cara dan pendekatan. Sebab hal itu bertolak belakang secara alamiah dengan kepentingan mereka. Yang satu (lapisan ekonomi bawah) berkepentingan untuk pembebasan dan emansipasi, yang lain (lapisan ekonomi atas) berkepentingan untuk mengekalkan penguasaan dan ketergantungan. Di mana saja di muka bumi ini, lapisan ekonomi atas tidak akan membiarkan lapisan ekonomi bawah menyadari nasib dan kelasnya atau bergerak ke arah persatuan senasib sepenanggungan antar sesama mereka. Bukan apa-apa. Karena hal itu akan menjadi mimpi buruk yang dapat menghancurkan kedudukan dan *privilege* yang dinikmati oleh lapisan ekonomi atas selama ini.³²

Namun untuk membangun suatu persatuan di kalangan lapisan ekonomi bawah tidaklah semudah mengatakannya. Pendeknya disusun sedemikian rupa persatuan dan kepemimpinan di lapisan ekonomi bawah ini. Ini merupakan tantangan tersendiri yang tidak ringan. Hanya tentu saja dibutuhkan usaha maksimal dan edukasi secara intensif. Dan juga pentingnya *leadership* yang kuat dan kharismatik. Penstrukturan yang rapi juga diperlukan.

A. Susunan dan Model Persatuan Lapisan Ekonomi Bawah

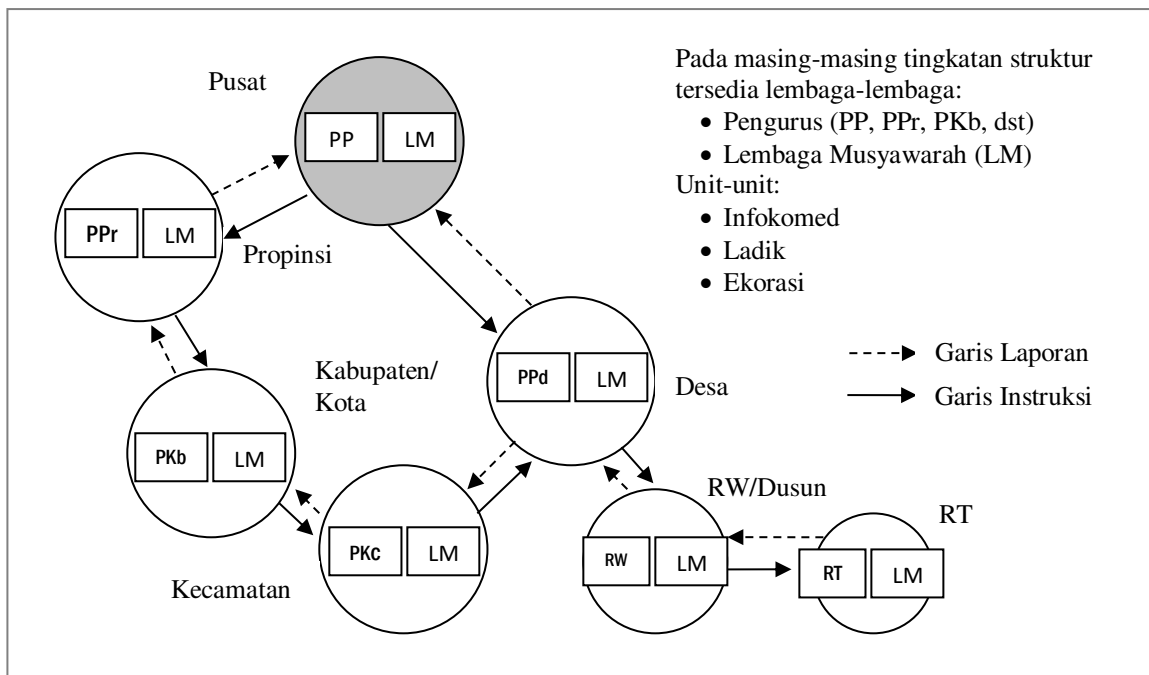
Persatuan berdasarkan kelas yang sudah terbangun seperti pada kelas buruh tidak harus—tentu yang dimaksud di sini Serikat Buruh yang benar-benar mencerminkan jati diri dan aspirasi buruh, bukan serikat yang disponsori oleh lapisan ekonomi atas—dihentikan hanya karena maksud membangun persatuan di lapisan ekonomi bawah. Bahkan persatuan buruh tersebut haruslah disokong sehingga suatu saat diperlukan perlawanan terhadap lapisan ekonomi atas, dapat dilancarkan tindakan boikot dan mogok secara serentak. Serikat buruh melaksanakan mogok, persatuan lapisan ekonomi bawah melancarkan boikot. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya akibat yang ditimbulkan serangan ekonomi serentak semacam itu.³³

Untuk menyusun struktur lapisan ekonomi bawah, hendaklah didasarkan dengan sifat membayangi struktur negara yang ada. Bila konteksnya Indonesia, dimana pemerintah memiliki struktur hirarkis dari pusat hingga desa, maka demikian pun dengan

³² Sanusi Pane, "Persatuan Indonesia," *Polemik Kebudayaan* (1998): 22–26.

³³ Mita Rosaliza, "Lapisan Sosial Masyarakat Perkotaan." *Jurnal Ilmu Budaya* 13, no. 2 (Februari 2017): 93–110.

sistem pengorganisasiannya. Hanya saja, pada masing-masing unit struktur, tersedia lembaga musyawarah yang memberikan arahan kepada pengurus pada masing-masing tingkatan. Sederhananya seperti diagram berikut.



Gambar 2: Struktur organisasi Lapisan Ekonomi Bawah

Unit terkecil, struktur desa, dapat terhubung secara langsung kepada struktur pusat, sebagaimana struktur propinsi terhubung dengan struktur pusat. Hal ini penting untuk menutup terjadinya disharmoni dan distorsi terhadap arus masuk informasi dan kebijakan.

1. Pembagian Fungsi

Pada masing-masing tingkatan, minimal terdapat dua lembaga, yaitu pengurus dan lembaga musyawarah.

- Pengurus yaitu eksekutif yang menjalankan kebijakan organisasi. Pada setiap jenjang, diatur sedemikian rupa. Misalnya, pengurus di tingkat pusat, yaitu Pengurus Pusat (PP), pengurus propinsi (PPr), pengurus kota/kabupaten (PKt/PKb), pengurus kecamatan (PKc), pengurus kelurahan (PKl), pengurus desa (PD), pengurus RW (PRW), dan pengurus RT (PRT).
- Lembaga Musyawarah (LM) yaitu berfungsi sebagai pengarah, perancang, penggodok, dan perumus kebijakan yang nantinya dilaksanakan oleh pengurus. Seperti halnya jenjang pengurus, demikian pun halnya dengan LM, seperti misalnya, LM Pusat (LMP), hingga LMRT.

2. Perangkat Organisasi

Pada masing-masing tingkatan terdapat unit-unit yang menangani secara khusus kepentingan organisasi, yaitu:

- Unit Informasi, Komunikasi dan Media (Infokomed)
Unit ini bertugas mengumpulkan informasi yang diperlukan, menyeleksi dan menggodoknya, lalu kemudian menyalurkannya kepada dua (2) arah: untuk

keperluan internal; dan keperluan propoganda ke luar. Untuk ke internal, berupa masukan, otokritik, dan pengayaan.

- Unit Latihan dan Pendidikan (Ladik)
Unit ini bertugas melatih dan mendidik, baik sifatnya pelatihan dan pendidikan ideologi, maupun teknis keterampilan yang diperlukan massa organisasi.
- Unit Ekonomi dan Koperasi (Ekorasi)
Unit ini bertugas mengembangkan dan mengelola sumber-sumber dan potensi-potensi ekonomi, dan menghidupkan institusi ekonomi dengan model manajemen koperasi.
Koperasi yang dikembangkan ialah:
 - Koperasi Permodalan (Bank)
 - Koperasi Pemasaran
 - Koperasi Produksi (pabrik)

Semua fungsi dan perangkat organisasi tersebut dilaksanakan pada setiap tingkatan. Bila tingkat kecamatan, anggotanya ialah kumpulan desa/kelurahan, maka demikian seterusnya hingga ke tingkat pusat. Hanya saja di tingkat pusat terdapat biro yang berfungsi menampung dan menganalisis arus informasi dari tingkat paling depan, yaitu desa/kelurahan. Biro ini diperlukan untuk *cross* informasi dan memastikan berjalannya roda organisasi hingga ke bagian paling depan, yaitu desa/kelurahan. Sebab dalam filsafat organisasi lapisan ekonomi bawah ini, poros organisasi tidaklah terdapat di tingkatan pusat. Pusat hanya bertanggung jawab sebagai pengarah, pembimbing, dan tempat konsultasi bagi tingkatan desa/kelurahan. Tingkatan desa/kelurahan inilah yang riil melaksanakan aktivitas dan interaksi dengan seluruh lapisan ekonomi bawah di dalam masyarakat. Oleh karena itu, organisasi tingkat desa/kelurahan haruslah betul-betul terjaga mutunya. Sebab ukuran mutu organisasi lapisan ekonomi bawah ini terletak di tingkat desa/kelurahan. Pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan harus benar-benar mengawasi organisasi tingkat desa ini, supaya berfungsi seperti yang dikehendaki sebagai wadah lapisan ekonomi bawah.

Untuk hal itu, pengurus di tingkat desa/kelurahan ini, tidak dipilih secara sembrono dan benar-benar terpilih karena kualitas sebagai berikut:

- Untuk yang duduk di Lembaga Musyawarah haruslah orang-orang yang pantas, seperti memiliki karakter penuh pertimbangan, wawasan yang memadai, dan dihormati
- Untuk yang duduk sebagai pengurus, ialah orang-orang yang aktif, rajin, komunikatif, berani dan bertanggung jawab.
- Untuk yang duduk di unit-unit, kualifikasinya disesuaikan dengan fungsi dan karakteristik unit-unit tersebut.

Mereka yang duduk pada pengurus dan Lembaga Musyawarah dilaporkan keberadaannya kepada tingkatan pusat, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

B. Prinsip dan Gaya Organisasi

Mengingat tujuan, pembentukan dan pengorganisasian lapisan ekonomi bawah ini ialah untuk mematahkan kekuasaan lapisan ekonomi atas, maka prinsip dan gaya organisasi haruslah merupakan lawan atau anti tesa dari prinsip dan gaya organisasi lapisan ekonomi atas yang cenderung bercorak hirarkis, elitis, terpusat dan eksklusif. Corak semacam itu cocok untuk kebutuhan lapisan ekonomi atas yang cenderung ingin mengontrol secara mudah objek kekuasaannya. Dengan prinsip dan gaya yang mengutamakan penguatan bagian terdepan, seperti tingkatan desa/kelurahan, maka diharapkan daya jangkauan organisasi terhadap lapisan ekonomi bawah yang menjadi basisnya dapat berjalan lebih efisien, efektif dan riil. Dengan gaya semacam itu juga

akan merepotkan lapisan ekonomi atas untuk berupaya menaklukkan lapisan ekonomi bawah. Bisa dibayangkan hasil yang akan dicapai, jika lapisan ekonomi bawah di setiap desa/kelurahan, aktif dan produktif. Tingkat pusat tidak boleh sekali-kali (pantang) menarik dan meletakkan diri sebagai patron atau pun komandan terhadap setiap tingkatan karena dapat mematikan inisiatif dan artikulasi di berbagai tringkatan. Pusat hanya bertugas membimbing dan mengarahkan agar terjadi gerak sinergis dan serentak untuk mencapai tujuan dasarnya: mematahkan kekuasaan lapisan ekonomi atas terhadap lapisan ekonomi bawah sembari merawat tumbuh dan berkembangnya kekuasaan tandingan lapisan ekonomi bawah hingga benar-benar kokoh dan berakar.

Kemudian dalam menyusun organisasi lapisan ekonomi bawah ini, hendaknya disuburkan sikap sukarela, rasa percaya, berani dan siap berkorban. Tidak boleh sekali-kali ada benih sikap yang tumbuh, seperti motif untuk kepentingan pribadi, kekuasaan pribadi, dan sejenisnya. Bahkan jika bisa, mereka yang ditempatkan di pengurus, hendaknya semata-mata untuk maksud memimpin dan memperkuat lapisan ekonomi bawah.³⁴

Organisasi semacam ini bukanlah partai yang memiliki kompensasi material seperti peluang untuk duduk di legislatif. Organisasi ini murni perjuangan untuk membela nasib sebagai lapisan ekonomi bawah yang terperas dan terhisap secara sistematis dan permanen. Karena itulah dibutuhkan kualitas pribadi pengurus yang siap berkorban, bertanggung jawab, dan berani mengambil risiko.³⁵

C. Tahap-tahap Pembinaan

Disebabkan terlalu lamanya lapisan ekonomi bawah terbenam dalam kondisi tereksplotasi, akibatnya tidak semua mereka menyadari bahwa sebenarnya mereka terbelenggu dalam eksploitasi oleh lapisan ekonomi atas. Mata mereka telah kabur untuk melihat kenyataan itu. Mereka memang merasakan adanya ketidakadilan dan kejanggalan yang menimpa hidup mereka, tapi mereka tidak mampu menyingkap tabir rahasianya, mengapa mereka merasakan ketidakadilan itu. Karena sejak semula, mereka tidak pernah dilatih dan dididik menyingkap tabir itu, selain hanya dilatih dan dididik bahwa tidak ada yang ganjil dalam hidup mereka. Semua yang mereka hadapi seolah-olah berlangsung alamiah sedemikian rupa. Jika mereka tidak berhasil dalam hidup, mereka memandang bahwa hal itu karena faktor diri mereka sendiri yang lemah. Dan kalau sudah bekerja keras tetapi tidak juga berhasil, maka itulah nasib yang harus mereka tanggungkan selama mereka hidup. Untuk menenangkan jiwa yang tertindas, palingkanlah pandanganmu kepada Pencipta. Semua penderitaan dan nasib manusia sudah suratan dari Yang Maha Kuasa. Demikian dogma hidup yang ditanamkan kepada kesadaran lapisan ekonomi bawah itu.³⁶

Oleh karena itu, yang paling pertama dan utama didekatkan kepada lapisan ekonomi bawah ialah soal perspektif (sudut pandang) terhadap realitas ekonomi dan sosial. Perspektif ini yang mungkin baru dalam alam pikiran mereka harus dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana mereka terjebak dalam kehidupan yang memprihatinkan yang sama sekali jauh dari ukuran keadilan.

Dalam proses transmisi perspektif ini, mereka harus dikontradiksikan dengan kenyataan-kenyataan sehari-hari yang dihadapi. Mereka dibimbing untuk belajar menggunakan perspektif ini untuk menjelaskan fakta-fakta ketimpangan ekonomi dan sosial di depan mata mereka. Tentu dalam proses ini, dibutuhkan waktu yang cukup sampai kemudian, perspektif lama yang mereka pegang goyah dan terlepas dari pikiran

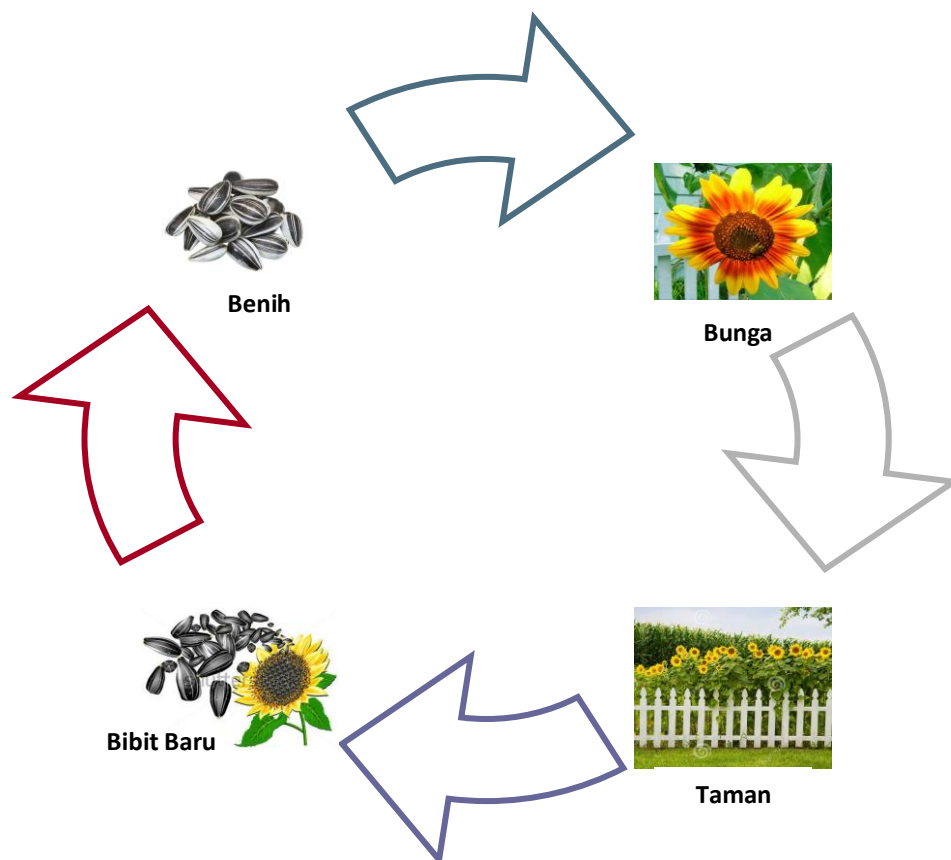
³⁴ Ibid.

³⁵ Fina Mardiana Nasution, Rudiansyah Siregar, and M. Joharis Lubis, "Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Keadilan Organisasi." *Jurnal Teknologi Pendidikan* XI, no. 2 (Juni 2022), <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>.

³⁶ Ibid.

mereka dan digantikan oleh perspektif yang baru mereka pelajari ini. Perlulah disini bimbingan sampai mereka menyadari tajamnya perspektif tersebut untuk membedah masalah ekonomi dan sosial yang mereka hadapi.³⁷

Ibaratnya, perspektif itu adalah benih. Kesadaran itu adalah bunga. Dan bunga itu harus dijaga dan ditopang, supaya tidak dihempaskan oleh angin jahat maupun dilayukan oleh kuman dari dalam. Lantas yang menjaga dan merawat itulah yang dinamakan persatuan. Persatuan itu bukanlah buah atau hasil, tapi merupakan sejumlah usaha dan proses. Bentuk dari usaha persatuan itulah yang dinamakan organisasi. Karena dengan persatuanlah, lapisan ekonomi bawah menjadi kokoh dan menawan.³⁸



Gambar 3: Diagram proses pembinaan LEB laksana siklus kehidupan bunga.

D. Pengorganisasian

Perlu sejak awal ditekankan bahwa tujuan pembentukan organisasi semata-mata bertujuan untuk meringankan pekerjaan dalam rangka mempersatukan lapisan ekonomi bawah, sambil melatih tanggung jawab dan keterampilan-keterampilan baru.

³⁷ 2011 Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, “Makalah Tentang Persatuan Dan Kesatuan,” *Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

³⁸ Ibid.

Seminim-minimnya, di setiap tingkatan terdapat 8 (delapan) orang yang terdiri atas:

PENGURUS	LEMBAGA MUSYAWARAH (LM)	UNIT-UNIT
<ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Sekretaris • Bendahara 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator • Sekretaris 	<ul style="list-style-type: none"> • Infokomed --- 1 orang • Ladik --- 1 orang • Ekorasi --- 1 orang

Begitu terbentuk organisasi, maka pengurus maupun lembaga musyawarah (LM) dan unit-unit bertugas sebagaimana mestinya. Jika terjadi kemandegan, harus secepatnya melapor ke tingkatan di atasnya, dalam hal ini struktur tingkat kecamatan, untuk dibimbing dan didampingi. Segala perkara yang masih bisa diselesaikan secara musyawarah, maka lembaga musyawarah menggelar musyawarah untuk mengatasi masalah, baik pesertanya terbatas mapun melibatkan semua anggota, tergantung urgensi perkara itu.

Organisasi ini harus dapat menjangkau seluruh lapisan ekonomi bawah di wilayahnya. Misalnya, di tingkat desa, katakan populasi penduduknya berjumlah 1000 KK dengan 950 KK yang dapat dikategorikan lapisan ekonomi bawah, maka organisasi harus mampu merangkul dan melayani lapisan ekonomi bawah sejumlah 950 KK di wilayahnya itu.

Kegiatan pelatihan dan ekonomi yang ditujukan untuk memandirikan lapisan ekonomi bawah, merupakan pendekatan yang ampuh untuk merangkul mereka dalam naungan organisasi. Kegiatan pelatihan misalnya, dapat dilaksanakan dengan melibatkan orang-orang pusat atau provinsi atau juga kabupaten/kota, untuk maksud meninggikan pamor dan wibawa kegiatan di mata mereka yang belum merapat ke organisasi.³⁹

E. Penamaan Lembaga

Guna memudahkan pemahaman dan pemasyarakatan terhadap tujuan dan taktik perjuangan lapisan ekonomi bawah ke tengah-tengah masyarakat, diberikan nama Gerakan Rakyat Mayoritas yang disingkat dengan Geramay. Penamaan ini tepat karena lapisan ekonomi bawah merupakan mayoritas dari masyarakat.⁴⁰

F. Iuran Organisasi

Dalam upaya mengokohkan barisan perjuangan lapisan ekonomi bawah, maka sepantasnya diterapkan sistem keuangan bersifat iuran. Jumlah iuran tidak boleh memberatkan anggota, dan tidak pula terlalu ringan. Ini penting sebagai pendidikan untuk berkorban dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Di samping itu, berguna untuk memandirikan organisasi dan melatih tanggung jawab kepada para pengurusnya. Misalnya setiap bulan ditarik iuran sejumlah Rp. 5000 per KK.⁴¹

Iuran itu harus dikelola secara transparan dan akuntabel, dan dilaporkan secara rutin kepada setiap pembayar iuran. Setidaknya struktur laporan mencakup hal-hal sebagai berikut:

Struktur Laporan Keuangan

	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SISA
--	-----------	-------------	------

³⁹ J Winardi, "Teori Organisasi & Pengorganisasian," *PT RAJAGRAFINDO PERSADA* 16 (2016): 20.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

Hal/Jumlah/Tanggal	Iuran Anggota/ 200.000/02-10-14	Beli 1 Lusin Gelas/ 100.000/03-10-14	100.000
	Iuran Anggota/ 200.000/02-11-14	Beli Meja/ 100.000/03-10-14	100.000
	Iuran Anggota/ 200.000/02-12-14	Snack Rapat/ 100.000/03-10-14	100.000
	Sumbangan Pak Lurah/ 300.000/04-11-14	-	300.000
Jumlah	900.000	300.000	600.000
Total Saldo			600.000

Laporan itu diinfokan oleh unit Infokomed kepada masing-masing pembayar iuran. Ini juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan organisasi.

Dana yang terkumpul dari iuran maupun sumbangan tersebut, 10%-nya diteruskan ke pusat. Sisa 90%-nya untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Sedangkan untuk kecamatan, kabupaten/kota, maupun provinsi, merupakan tanggung jawab pusat melalui sistem keuangan yang ada.

Mengapa organisasi desa tidak membagi ke kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, karena pekerjaan administratif seperti itu lebih baik diberikan satu pintu, dalam hal ini pusat. Biarlah pusat yang mengurus dan mensubsidi struktur kecamatan hingga provinsi. Dan merupakan kewajiban pusat untuk mengelola dan melaporkan keuangan secara transparan dan akuntabel secara berkala yang disampaikan kepada struktur provinsi hingga desa/kelurahan, sebab di sinilah salah satu kunci keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Namun untuk menghemat biaya laporan, dapat disampaikan lewat *email* dan *website* institusi.⁴²

Namun yang harus diingat, urusan-urusan administratif jangan sampai mengganggu konsentrasi pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas pokok, yaitu membela lapisan ekonomi bawah dan mematahkan kekuasaan lapisan ekonomi atas.

KESIMPULAN

Visi Indonesia Rahmat untuk Semesta menuntut Indonesia untuk mengatasi masalah internal dan meningkatkan pengaruhnya di kancah internasional dengan pendekatan yang damai dan adil. Dengan memanfaatkan modal yang dimiliki dan mengatasi ketimpangan serta kemiskinan, Indonesia dapat menjadi negara yang membawa kedamaian, keadilan, keamanan, dan kemakmuran bagi seluruh dunia.

Sejarah Indonesia sebagai bangsa yang terbentuk dari kesatuan cita-cita masa depan dan pengalaman bersama sebagai objek penjajahan Belanda menciptakan ikatan agama dan budaya yang kuat. Peristiwa historis utama yang membentuk Indonesia perlu menghadapkan orientasinya ke luar untuk memberikan pengaruh dan andil dalam kehidupan umat manusia global. Indonesia harus menyelesaikan masalah internalnya untuk menjadi negara yang berpengaruh secara global. Memperkuat ikatan batin dan ketaatan antara pemerintah dan rakyat Ketimpangan dan kemiskinan adalah masalah utama yang membelit Indonesia.

Susunan ekonomi yang eksploitatif dan melembaga sejak era penjajahan Belanda masih berlanjut hingga kini, menciptakan fenomena sosio-kultural yang kompleks. Kontinuitas penjajahan terlihat dalam kolaborasi antara borjuasi Cina dan tentara yang saling melengkapi dan menghisap kekayaan penduduk serta sumber daya. Pola ini

⁴² Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, "Makalah Tentang Persatuan Dan Kesatuan."

berlanjut hingga masa Orde Baru dan era reformasi, menciptakan hubungan kolaboratif antara pemegang senjata, pemegang cek, dan pemegang stempel garuda. Selama Orde Baru, bisnis besar selalu melibatkan militer untuk urusan proteksi dan keamanan. Pola kolaborasi antara pengusaha Cina dan tentara menjadi siklus pemerasan yang tak berkesudahan, menciptakan penjajahan internal yang terus berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Agus. "Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no. 1 (November 2020): 031–048.
- Adhitya, Bagus, Agus Prabawa, and Heris Kencana. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (Maret 2022): 288.
- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Dede Abdurrohman, Naeli Mutmainah, and Memet Slamet. "Implementasi Rahmatan Lil-Alamin Dalam Ekonomi Islam (Analisis Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Negara Tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah Dan Wakaf Tunai) Di Indonesia)." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (April 2022): 28.
- Ali, Mohamad. "Arus Pendidikan Islam Transformatif Di Indonesia: Sebuah Penjajagan Awal." *SUHUF Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya* 29, no. 1 (Mei 2017): 1–14. <http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/4930>.
- Anugrah, Audi, Abdul Malik Karim Amrullah, and Muhammad Inâ€™am Esha. "Tipologi Manajemen Tradisional Dan Modern Dan Klasifikasinya Dalam Manajemen Pendidikan Islam." *Journal of Islamic Education : The Teacher of Civilization* 3, no. 1 (Maret 2022): 1–19.
- Asmani, Jamal Mamur. "Rekonstruksi Teologi Radikalisme Di Indonesia, Menuju Islam Rahmatan Lil Alamin." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, no. 1 (Juni 2017): 3.
- Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2011. "Makalah Tentang Persatuan Dan Kesatuan." *Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.
- Fina Mardiana Nasution, Rudiansyah Siregar, and M. Joharis Lubis. "Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Keadilan Organisasi." *Jurnal Teknologi Pendidikan* XI, no. 2 (Juli 2022). <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>.
- Hadi, Nur, Wasehudin, Naila Najla Surbakti, Ai Elia Martatiningsih Arum, and Diah Nuraffiatul Jannah. "Relevansi Konsep Rahmatan Lil 'Alamin Terhadap Toleransi

- Beragama.” *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (Juni 2023): 21–29.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern.” *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (Juli 2021).
- Hefni, Harjani. “Makna Dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan Lil’Alamin Di Indonesia.” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 1 (Juni 2017): 1–20.
- Hernawan, Ari. “Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dan Pengusaha Dalam Mogok Kerja.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 3 (2013): 418.
- Huda, Choirul. “EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME (Merunut Benih Kapitalisme Dalam Ekonomi Islam).” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (Mei 2016): 27–49.
- Jamaluddin, Muhammad Nur. “Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (Desember 2021): 271–394.
- Kartikasari, Dwi, and Rifki Khoirudin. “Analisis Determinan Impor Di Indonesia Periode 2011 - 2020.” *Ecoplan* 5, no. 1 (April 2022): 72–86.
- Mufid, Muhamad. “Penguatan Moderasi Beragama Dalam Proyek Profil Pelajar Rahmatan Lil ’alamin Kurikulum Merdeka Madrasah.” *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (Februari 2023): 141–154.
- Pane, Sanusi. “Persatuan Indonesia.” *Polemik Kebudayaan* (1998): 22–26.
- Rosaliza, Mita. “Lapisan Sosial Masyarakat Perkotaan.” *Jurnal Ilmu Budaya* 13, no. 2 (Februari 2017): 93–110.
- Suryadi, Muhammad. “Moderasi Beragama Sebagai Kerangka Paradigma Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin.” *Educandum* 9, no. 1 (Juni 2023): 53–62.
- Tanjung, Arsil, Wayan Midhio, and Kurniawan Firmuzi Syarifuddin. “Kajian Literatur: Penerapan Strategi Perang Semesta Dalam Perang Asimetris Yang Dilakukan Oleh Indonesia.” *Strategi Perang Semesta* 7, no. 2 (Desember 2021): 144–160. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPS/article/view/685>.
- Tenrinippi, A. “Kewirausahaan Sosial Di Indonesia (Apa , Mengapa , Kapan , Siapa Dan Bagaimana).” *Meraja Journal* 2, no. 3 (November 2019): 25–40.
- Tisniawati, Baiq. “Analisis Faktor-Faktor Tingkat Kemiskinan Di Indonesia” (2012): 33–46. <https://media.neliti.com/media/publications/70641>.